



LAPORAN PENELITIAN
DIP UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKE
54-12
324.200.108
P

PETA KEKUATAN 48 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1999



Peneliti :

Drs. ARIBOWO, M.Si.

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : DIP Universitas Airlangga 1999/2000
Nomor SK. Rektor 8402/J03/PP/1999
Nomor Urut : 103

300040013141

PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi(5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246
 E-mail: lpunair@rad.net.id — http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN
 LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

1. a. Judul Penelitian : Peta Kekuatan 48 Partai Politik Peserta Pemilu 1999
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, (V) Terapan, () Pengembangan,
 () Instiusional
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Drs, Aribowo, M.S.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Tk. I. / Gol. III d - 131 453 806
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Puslit Pengembangan Hukum
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Ilmu Politik
3. Jumlah Tim Peneliti : 1 (Satu) orang
4. Lokasi Penelitian : FISIP Universitas Airlangga
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 6 (Enam) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 3.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 23 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
 () S e d a n g () Kurang

Surabaya, 23 Februari 2000

Mengetahui/Mengesahkan :
 Aa.H. Rektor
 Ketua Lembaga Penelitian,
 Dr. Dr. Noor Cholies Zaini
 130 355 372

RINGKASAN PENELITIAN

PETA KEKUATAN 48 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 1999

(Aribowo; 1999, 70 Halaman)

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Penelitian ini memfokuskan pada gejala lahirnya partai politik baru dan lama setelah rezim Soeharto runtuh. Kemudian juga mengaji secara mendalam pola konflik masa kampanye, pemilu dan akhirnya Sidang Umum MPR 1999. Dari kajian itu diperoleh simpulan sebagai berikut.

Partai politik peserta pemilu 1999 merupakan refleksi dari reaksi masyarakat atas ambruknya sistem politik otoriter rezim Soeharto. Karena itu di balik ratusan parpol baru dan 48 parpol peserta pemilu merupakan gejala bangkitnya kekuatan rakyat yang berpuluh tahun diformat dan dikemas secara kaku dan terbatas dalam sistem politik Orde Baru.

Parpol peserta pemilu pada dasarnya merupakan refleksi dari heterogenitas masyarakat Indonesia. Secara sederhana 48 parpol peserta pemilu bisa dipilah ke dalam dimensi agama, nasionalisme, klas sosial, pola aliran. Komposisi 48 parpol peserta pemilu 1999 sangat bervariasi. Tidak bisa hanya difahami dalam pola aliran, tidak juga hanya dalam pola klas sosial, dan tidak hanya pola konflik negara dan masyarakat. Pola 48 parpol peserta pemilu merupakan generasi ke-4 parpol Indonesia yang sedang mengalami perubahan.

Perolehan suara dalam pemilu 1999 ternyata sebagian besar masih menunjukkan ke arah konservatisme masyarakat dalam berpolitik. Kecenderungan politik atas dasar *political identification* masih sangat kuat dalam proses pemilu dan perpolitikan di Indonesia. Pola ini melahirkan kecenderungan pola aliran.

Perolehan suara yang besar dari PDI-P, PKB, PPP, dan Golkar merupakan kuatnya gejala konservatisme dalam perpolitikan Indonesia. PDI-P dapat kursi 131, Golkar 120, PPP 58, PKB 51, PAN 34, PBB 13, PK 7, PKP 4, PDI-BH 2, PDKB 5, PNU 5, dan masing-masing PKD, IPKI, PPI Masyumi, PKU, PNI-FM, PNIM, PSII, PP, PDR, dan PBI dapat 1 kursi.

Sementara PAN pun banyak didukung oleh suara Islam, utamanya sebagian suara Muhammadiyah. Para orang kota yang kritis tidak terlalu banyak menentukan suara dalam pemilu 1999. Mereka cenderung hanyut dalam pola aliran besar. Karena itu kekerasan politik pemilu dan kerusuhan politik setelah pemilu merupakan bagian penting dari perpolitikan konservatisme dalam kondisi transisi saat ini.

**(L.P. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, Universitas Airlangga,
No. Kontrak: 805/JO3.2/PG/1999)**

KATA PENGANTAR

Penelitian ini tentu belum sempurna. Banyak perkembangan baru, variabel susulan yang berkembang begitu cepat, dan waktu terbatas menyebabkan kelemahan mendasar penelitian ini. Karena itu saya ingin menganggap penelitian ini sebagai proses: sesuatu yang akan terus berkembang.

Atas dasar pemikiran di atas maka seberapa pun hasilnya saya berharap hasil penelitian sederhana ini bisa menjadi awal diskusi kita yang panjang tentang gejala perpolitikan Indonesia. Minimal penelitian sederhana ini memberi kesempatan bisa merekam secara sederhana pula proses perubahan sistem politik otoriter ke transisi demokrasi, kalau kelak memang bisa demokrasi.

Memang proses transisi banyak "penyakit" sosial dan politik. Lewat penelitian sederhana ini saya merasakan betapa banyak persoalan besar yang menyeruak begitu rupa. Dan semua itu berjalan dengan cepat. Penuh varian.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof, Noorcholies Zaini, Mas Zaidun, Pak Sudiro, dan kawan-kawan di Tabloid Research yang banyak membantu penelitian ini. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah SWT. Dan untuk Kukuh Imam Muhamad (yang insyaAllah ada di sorga), selalu aku kenang sebagai sesuatu yang paling indah yang pernah kumiliki. Kupersembahkan juga untuk Tifa, Lirih, Adil, dan Koya.

Semua kelemahan penelitian ini sepenuhnya tanggung jawab saya sendiri.

Aribowo
Maret 2000

DAPTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Ringkasan Penelitian.....	ii
Kata Pengantar.....	iv
Daptar Isi.....	v
Daptar Tabel dan Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II:	
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
Teori Perkembangan Parpol.....	11
Transisi ke Demokrasi.....	13
Dua Model Pemilu.....	18
BAB III:	
PEMILU DAN KEKERASAN POLITIK.....	27
BAB IV	
RAKYAT MEMILIH MODERAT.....	43
BAB V:	
DARI UTUSAN GOLONGAN HINGGA TNI.....	54
BAB VI	
KESIMPULAN.....	68
DAPTAR PUSTAKA.....	70

DAPFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1: Klasifikasi Parpol atas Dasar Program	4
Tabel 2: Komposisi Ideologi Parpol Kontestan Pemilu 1999.....	6
Tabel 3: Opini Sebagian Masyarakat tentang Kebebasan Politik 1998.....	28
Tabel 4: Kerusuhan dan Kekerasan Politik Sebelum dan Sesudah Lengsernya Rezim Soeharto.....	34
Tabel 5: Pelaku Kecurangan Pemilu versi PPP di Jatim 1992-1997.....	40
Tabel 6: Pelaku Pelanggaran Pemilu 1992 di Jatim versi PDI.....	40
Tabel 7: Perolehan Kursi dalam Pemilu 1999 (Sebelum Stembus Accord)...	48
Tabel 8: Perolehan Kursi Setelah Stembus Accord.....	49
Tabel 9: Perolehan Kursi Akhir Pemilu 1999.....	50
Tabel 10: Parpol Terbanyak Dapat Kursi di Tingkat Propinsi.....	51
Tabel 11: Parpol yang Bersedia Menandatangani Berita Acara Pengesahan..	52
Tabel 12: Parpol yang Menolak Tanda Tangan BAP.....	52
Tabel 13: Parpol yang Belum Jelas Sikapnya.....	53
Tabel 14: Komposisi Poros Tengah.....	60
Tabel 15: Komposisi Utusan Golongan 1999.....	60
Tabel 16: Kemungkinan Pola Aliansi dalam SU MPR 1999.....	65
Tabel 17: 3 Kubu yang Memperebutkan Kursi Presiden.....	66
Gambar.....	26

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Penelitian

Negara telah memutuskan, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang boleh ikut menjadi kontestan pemilu 1999 sebanyak 48 parpol. Menjadi sangat jelas, setelah berbulan-bulan masyarakat Indonesia disugahi deklarasi parpol baru, yang sering tegang dan menakutkan itu, sebanyak lebih dari 150 parpol. Ini artinya ada sekitar 100 lebih parpol yang telah mendaftarkan diri itu "tergusur".

Akibatnya banyak parpol yang tidak lolos verifikasi Tim 11 akan menggugat ke PTUN. Tetapi setelah terjadi serangkaian diskursus tentang parpol peserta pemilu dan parpol tergusur dan masyarakat luas tampaknya keinginan mem-PTUN-kan Tim 11 dan Pemerintah mulai menghilang. Memang muncul berbagai ketidakpuasan, tetapi Tim 11 tidak mungkin berbuat lain kecuali membuat seleksi ketat, betapa pun kontroversial.

Dilihat dari sudut ini pemilihan umum 1999 sebenarnya sangat rawan konflik. Bentuk konfliknya melebar-meluas. Seolah setiap hal berpotensi menjadi konflik. Dan setiap hal berpotensi menjadi faktor penghambat atau penggal pemilu. Tak heran kalau banyak kalangan semakin pesimis terhadap jadi atau tidaknya pemilu Juni 1999.

Menyaksikan begitu rapuhnya prospek keberhasilan pemilu 1999 padahal banyak kalangan menganggap hanya pemilu 1999 satu-satunya jalan untuk membentuk pemerintahan yang absah, maka segera berbagai kalangan dan komponen masyarakat yang peduli kepada perkembangan demokrasi Indonesia segera turun tangan. Salah satu dari komponen masyarakat itu adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam KIPP

(Komite Independen Pemantau Pemilu), UNFREL, Forum Madani, Forum Rektor, dan berbagai LSM lainnya yang terlibat dalam upaya untuk keberhasilan pemilu yang demokratis, bebas, dan jujur. Mereka juga didukung oleh berbagai lembaga internasional, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas lainnya. Di samping itu berbagai komponen mahasiswa pun segera bergabung ke dalam kekuatan Reformasi ini, dengan satu tujuan: pemilu yang demokratis!

Karena itu sebenarnya salah satu keberhasilan pemilu 7 Juni 1999 secara demokratis maka salah satu jasa besar adalah para kekuatan Reformasi yang bersayap-sayap, bergelombang-gelombang, tetapi penuh militansi. Kekuatan *civil society* inilah sebenarnya yang "mendampingi" berbagai parpol baru dan lama yang sedang "bertanding" merebut kekuasaan negara.

Lalu apakah wajah parpol peserta pemilu 1999 ?

Dari segi sejarah kelahirannya, ada beberapa parpol yang sekarang diaktifkan kembali atau dihidupkan kembali yang dulu sejak Orde Lama (Orde Lama: jaman Demokrasi Parlementer dan Terpimpin) telah ada. Setelah rezim Soeharto runtuh, maka parpol itu diaktifkan atau dihidupkan kembali. Parpol itu antara lain adalah: PSII, PNI-Massa Marhaen, Partai MURBA, IPKI, dan Masyumi (sebanyak 5 buah)

Sedangkan yang dilahirkan sejak rezim Soeharto berkuasa sebanyak 3 buah, yaitu PPP, PDI, dan Golkar. Tetapi menjelang berakhirnya kekuasaan rezim Soeharto bertambah menjadi 8 (meskipun oleh rezim selain yang 3 parpol resmi dianggap inskontitusional) yaitu Golkar, PPP, PDI Budi Hardjono, PDI Perjuangan, Masyumi Baru, PUDI, PNI-Supeni, dan PRD (5 parpol terakhir saat rezim Soeharto berkuasa dianggap kontroversial dan bukan parpol kontestan pemilu).

Banyaknya parpol sejak Pemerintahan Transisi ini untuk sementara bisa kita katakan sebagai peledakan atau revolusi harapan dari sekelompok masyarakat yang tak puas terhadap konstelasi 3 parpol sejak 32 terakhir. Kalau kita cermati, parpol sebanyak itu (di atas 148 buah) merupakan cerminan dari ketidakpuasan dan peledakan kebebasan dari berbagai komponen dalam masyarakat. Parpol-parpol baru itu merentang dari kumpulan para seniman dan dagelan (yang sampai hari ini disangsikan keseriusannya/tetap dianggap dagelan belaka), buruh, tani, agamawan, intelektual, politisi, perempuan (isu gender), ABRI atau purnawirawan "bingung", mahasiswa, pengusaha, dan sebagainya.

Secara hipotesis sebenarnya 48 parpol kontestan pemilu bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1: Klasifikasi Parpol atas Dasar Program

NO	SASARAN PROGRAM	JUMLAH	KETERANGAN
1	Untuk Buruh dan/Tani dan/Nelayan dan/Sektor Informal	9	MURBA,PBN,PPI,PBI,PRD, PSP,PDR,PADI, dan Partai SPSI
2	Untuk Anak Yatim Piatu	1	Partai ABUL YATAMA
3	Mempertahankan Negara Kesatuan, Memperjuangkan Aspirasi dan Kedaulatan Rakyat	18	PPP (asasnya Islam dalam negara kesatuan), PDI Perjuangan, Partai Golkar (ditambah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pengembangan ekonomi rakyat), PND (ditambah mempertahankan UUD 1945 dan Pancasila), PKP, PDI-BH, Partai Republik (ditambah mengatasi krisis nasional, stabilitas politik, dan menegakkan wibawah pemerintah), PKB (ciri humanisme-religius), Partai MKGR (ekonomi rakyat), KRISNA (mempertahankan dwi-fungsi ABRI, Pancasila, dan UUD'45), PNI Massa Marhaen, Partai Rakyat Indonesia, IPKI (mempertahankan dwi-fungsi ABRI), PNI-Supeni, PILAR, PNBI, PNI-Front Marhaen, PKM
4	Menegakkan Nilai Islam dalam Negara Indonesia	16	PSII, Partai Keadilan, PBB, Partai Cinta Damai, Partai NU, PUI, PUMI, PKU, SUNI, Partai Persatuan, Masyumi Baru, KAMI, Masyumi, PID, PSII 1905, PIB

Dari tabel di atas tampak sekali kalau dari 48 parpol yang programnya difokuskan untuk kelas bawah sangat terbatas. Ini tidak berarti banyak parpol yang tidak didukung kelas bawah. Tapi dari program mereka tak banyak yang untuk kelas bawah, meskipun tetap didukung kelas bawah. Begitu pula yang berorientasi ke nilai Islam sangat banyak. Dari parpol "besar" seperti PPP, PAN, PKB, dan PBB mempunyai basis dukungan umat Islam. Tapi secara ideologi politik mereka tetap mengalami polarisasi.

Wajah lain dari 48 parpol peserta pemilu 1999 adalah munculnya kembali gejala politik aliran. Mungkin banyak terjadi variasi jika dibandingkan dengan gejala politik aliran ditahun 1950 dan 1960-an. Tetapi dasar-dasar primordialnya relatif masih tampak. Gejala itu semakin kentara tatkala pemilu telah usai. Hasil perolehan suara fantastis dari PDI-P, sekitar 36-40%, dan perdebatan tentang calon presiden menunjukkan varian kultural masih terasa, meskipun polanya sedikit berbeda. Pola konfliknya semakin kompleks dan memenuhi pola lateral. Lihat tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Komposisi Ideologis Parpol Kontestan Pemilu 1999

No	Format Ideologis/Masa	Jumlah	%	Keterangan
1	"Berbau" Nasionalis (PNI)	6	12,5	PDI Perjuangan, PND, PDI, PNI-Massa Marhaen, PNI-Supeni, PNI-Front Marhaenis (Partai-partai ini banyak berwarna PNI, meskipun saat ini sudah sangat banyak varian pragmatisnya. Dan juga ada yang berbau nasionalis radikal)
2	"Berbau" Islam/Partai Islam	19	39,58	PPP, PSII, Partai Keadilan, Partai Cinta Damai, PKB, PBB, PAN, Partai NU, PUI, PUMI, PKU, SUNI, PP, Masyumi Baru, KAMI, MASYUMI, PID, PSII 1905, PIB (Partai-partai Islam ini sangat heterogen: ada yang bersinkretis dengan tradisional Jawa, ada yang lebih berbau sosialis demokrat, dan ada yang Islam "modern")

3	Partai Katolik/Protestan	2	4,17	KRISNA, PKD. Di samping 2 parpol ini orang katolik dan protestan dan keturunan Cina membikin partai PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa)
4	"Berbau" militer	3	6,25	PKP,IPKI, Partai MKGR (partai-partai ini juga bersifat nasionalistis, dalam arti lebih mengarah format Nation-state). Di samping itu beberapa jenderal purnawirawan "mempunyai parpol asuhan" yang bernama Partai Kebangsaan Merdeka.
5	Berbasis Buruh	5	10,42	PBN, PPI, PRD, PSP, Partai SPSP (partai-partai ini ada yang bersifat sosialis demokrat, nasionalis radikal, dan Islam)
6	Bersifat Kebangsaan	6	12,5	Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Golkar, PILAR (Partai Pilihan Rakyat), PNBI (Parta Nasional Bangsa Indonesia),
7	Bersifat LSM	4	8,33	PADI (Partai Aliansi Demokrat Indonesia), PDR (Partai Daulat Rakyat), Partai

				MURBA, Partai Rakyat Indonesia (PARI)
--	--	--	--	---------------------------------------

Pengklasifikasian ini bersifat sederhana. Masih perlu didiskusikan secara akademik. Karena itu mencermati peta kekuatan parpol peserta pemilu 1999 pada dasarnya merupakan miniatur konflik ideologi, kepentingan, dan golongan yang ada di Indonesia. Di samping itu juga merupakan awal untuk memahami gejala demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia sejak rezim Soeharto runtuh.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas tampak sekali polarisasi dan pluralitas kekuatan politik peserta pemilu. Dari sini bisa ditarik beberapa persoalan.

1. Bagaimanakah peta kekuatan politik (partai politik) peserta pemilu 1999 terbentuk?
2. Hasil pemilu 1999 membentuk format politik macam apa?
3. Mengapa hal itu bisa terjadi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perkembangan partisipasi politik sejak rezim Soeharto runtuh.
2. Mendeskripsikan perkembangan partai politik peserta pemilu 1999
3. Memformulasikan hasil pemilu 1999 dan peta kekuatan politik yang pasca pemilu 1999
4. Memformulasikan gejala demokrasi pasca pemilu dengan format kekuatan politik baru.

D. Kontribusi Penelitian

1. Melalui penelitian ini kita bisa mengamati perkembangan demokrasi sejak rezim Soeharto runtuh.
2. Penelitian ini bisa menjadi informasi penting perkembangan penelitian ilmu politik di Indonesia
3. Bagi lembaga penelitian Unair bisa menjadi diskursus tentang aplikasi teori-teori politik terhadap gejala perubahan yang terjadi di Indonesia.

E. Metode Penelitian:

Penelitian ini tidak berpretensi untuk melakukan studi eksplanasi yang menghubungkan atau menguji pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain. Penelitian ini hanya bertujuan untuk mendeskripsikan sedetail mungkin mengenai peta dan komposisi kekuatan 48 partai politik peserta pemilu 1999. Penelitian ini berusaha menganalisis basis ideologi, basis ekonomi, struktur sosio-kultural dan pola kecenderungan 48 parpol peserta pemilu 1999.

Dari dasar pemikiran macam itu penelitian ini berusaha menghubungkan dengan perolehan suara 48 parpol itu. Dan kemudian dari sana coba ditarik perspektif lebih jauh, demokrasi apa yang bakal berkembang dengan format 48 parpol dan pola pemerintahan baru pasca rezim B.J Habibie.

Karena itu penelitian deskriptif ini berusaha memberi makna mendalam tentang gejala politik setelah pemilu 1999 yang berlangsung lebih jurdil, aman, dan relatif demokratis. Untuk itu penelitian ini lebih cenderung menggunakan analisis dan metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini lebih banyak menggunakan studi pustaka. Artinya data dan analisis lebih banyak diambil dari pustaka: jurnal, buku, dan data sekunder. Sedangkan data primer digunakan secara pragmatis dengan teknik purposive (pimpinan parpol). Sedangkan ruang lingkup penelitian bersifat nasional dengan memberi tekanan pada gejala yang kuat pada kasus-kasus politik yang memberi arti besar bagi gejala pluralitas parpol di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder. Data diambil dari literatur, jurnal, dokumen resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum), PPI, PPD I, PPD II, Panwaslu I dan II, media massa, dan arsip. Untuk memperkuat peta kekuatan politik 48 parpol maka diperlukan juga wawancara mendalam dengan pimpinan parpol peserta pemilu, utamanya yang ada di daerah. Karena itu data primer sebenarnya data penunjang.

Analisa dari data yang terkumpul akan dipaparkan dalam bentuk essay yang banyak menonjolkan dan mengandalkan model analisa kualitatif. Data berupa angka, tabel frekuensi atau tabel silang, akan sejauh mungkin diusahakan ditampilkan dalam laporan guna memperjelas dan memudahkan para pembaca memahami permasalahan yang dikaji. Dengan kata lain, data-data kuantitatif yang akan disajikan sifatnya hanya sebagai pendukung yang melengkapi model analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Perkembangan Parpol

Menurut Joseph Lapalombara dan Myron Weiner, partai politik merupakan *a creature of modern and modernizing political system*. Partai politik (parpol) memang lahir dan berkembang ketika gejala modernisasi sedang berkembang di Eropa, setelah revolusi industri. Karena itu awal perkembangan parpol merupakan salah satu indikator gejala modernisasi masyarakat, dimana telah terjadi peledakan partisipasi masyarakat dan pemindahan hak-hak politik kepada masyarakat semakin meluas (Lapalombara dan Weiner, 1966).

Lapalombara dan Weiner mengajukan 3 teori tentang munculnya parpol. Pertama, teori kelembagaan (*institutional theory*). Teori ini melihat ada keterkaitan yang kuat antara keberadaan parlemen dan munculnya parpol. Weber, misalnya, melihat ada hubungan antara pertumbuhan parpol dengan tumbuhnya tahapan klik para aristokrat, kelompok-kelompok kecil para bangsawan, dan pemilihan yang demokratis.

Maurice Duverger juga mengemukakan pendapat adanya keterkaitan antara evolusi parlemen nasional dan pertumbuhan orang-orang yang berhak ikut memilih. Parpol lahir karena kebutuhan para anggota parlemen untuk memperoleh pendukung. Karena itu tahapan pertumbuhan parpol melalui: pertama, adanya parlemen, kemudian diikuti oleh pembentukan komite pemilihan, setelah itu terdapat hubungan yang tetap antara dua elemen itu (Maurice Duverger, 1955).

Kedua, teori situasi historis (*historical-situation theory*). Kemunculan partai politik berkait dengan krisis yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Ada tiga jenis krisis yang mendorong kemunculan partai. Pertama, krisis legitimasi. Seiring dengan modernisasi di Eropa, terjadi perubahan-perubahan yang besar, termasuk di dalamnya adalah tuntutan perubahan otoritas yang dimiliki oleh kerajaan yang feudal. Masyarakat, utamanya kalangan menengah, borjuis, tidak lagi memandang penguasa memiliki legitimasi. Parpol didirikan sebagai upaya untuk mencari pemimpin yang memiliki otoritas yang legitimate. Adapun keterkaitan antara berdirinya partai dengan upaya memperbaiki krisis legitimasi ini adalah karena terdapat kecenderungan perubahan dasar legitimasi. Kalau sebelumnya legitimasi datangnya dari atas, kerajaan, belakangan legitimasi datangnya dari bawah (masyarakat). Secara demikian parpol merupakan instrumen kelas menengah untuk memperoleh dukungan dari bawah. Yang kedua, krisis integrasi. Modernisasi di Eropa juga menimbulkan ancaman berupa disintegrasi wilayah. Kemunculan parpol dimaksudkan untuk mengatasi krisis integrasi. Apalagi parpol memiliki basis dukungan yang lintas wilayah. Yang ketiga, krisis partisipasi. Industrialisasi telah membawa perubahan-perubahan besar di bidang sosial, ekonomi, dan sistem stratifikasi. Akibatnya, penguasa yang sudah kehilangan legitimasi juga kehilangan partisipasi rakyat. Melalui parpol rakyat bisa lebih berperan di dalam menentukan kebijaksanaan negara.

Teori ketiga adalah teori perkembangan (*development theory*). Perubahan-perubahan besar, sebagai konsekuensi dari modernisasi, juga telah membawa perubahan-perubahan lain. Diantaranya adalah munculnya kelompok-kelompok sosial baru (*social force*), baik yang berbasis kelas, profesi, maupun kelompok-kelompok

lain. Agar kelompok ini diakui keberadaannya, juga bisa menyalurkan kepentingan-kepentingannya, maka dibentuklah parpol.

Jelaslah sejak berkembangnya revolusi partisipasi rakyat maka parpol semakin menjadi bagian penting dari sistem politik modern. Bahkan Roy C. Macridis mengatakan, tidak ada sistem politik yang dapat berlengsung tanpa parpol. Di dalam masyarakat modern parpol menjadi fenomena umum dalam kehidupan politik. Parpol sebagai suatu asosiasi politik yang mengaktifkan, memobilisasi masyarakat, mewakili kepentingan tertentu, dan melakukan pengkaderan yang kemudian melahirkan pemimpin telah menjadi suatu keharusan. Parpol dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting untuk memobilisasi masyarakat ke dalam kekuasaan negara. Ini berarti parpol pada dasarnya adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memrintah (Roy C. Macridis, 1988).

2. Transisi ke Demokrasi

Ada banyak tesis yang menyebabkan negara bisa berubah. Menurut Barrington Moore masyarakat berubah ke demokrasi bisa melalui 4 jalur: pertama, demokrasi berkembang disebabkan menguatnya borjuasi. Borjuasi ini independen dan mampu mengontrol negara. Di samping itu masih ada perimbangan klas pemilik tanah dan negara. Sedangkan klas petani lemah. Hal ini terjadi karena proses komersialisasi pertanian para petani dirugikan dan bahkan dihancurkan oleh klas pemilik tanah dan kekuatan lain.

Kedua, Model Jepang (Fasisme). Model ini formulasinya adalah para borjuasi kota lemah. Sedangkan klas pemilik tanah dominan. Sementara klas buruh lemah.

Ketiga, model revolusi Komunis (Cina): borjuasi kota lemah. Negara kuat dan dominan. Hubungan tuan tanah dengan petani lemah. Sedangkan tuan tanah tidak mampu melakukan komersialisasi pertanian. Dan petani bersatu membikin organisasi.

Keempat, model demokrasi India: modernisasi tidak berkembang. Sedangkan kolonial melindungi kelas atas pemilik tanah dan membiarkan surplusnya diambil. Surplus itu tidak untuk pertumbuhan industrialisasi pertanian. Sedangkan borjuasi kota lemah. Kelas atas pemilik tanah tidak berkepentingan melakukan komersialisasi pertanian. Petani tidak bersatu dan tidak punya pemimpin untuk aksi politik. Dan 3 kelas sosial tidak ingin memutuskan hubungan dengan masa lalu.

Sementara itu Richard Robison merumuskan transisi ke demokrasi dalam beberapa format: pertama, kapitalisme industrial berkembang cepat. Hal ini menimbulkan pemilik kapital baru. Perkembangan ini didukung negara otoriter.

Kedua negara-negara otoriter sangat cocok untuk menjalankan fungsi politik dan ekonomi yang esensial bagi perkembangan kapitalisme. Fungsi negara adalah:

- ▣ menjamin tidak terjadi revolusi sosial atau reformasi yang umumnya diinginkan buruh dan petani.
- ▣ melakukan investasi industri berat dan infra struktur ekonomi
- ▣ memberi kredit murah dan protektif bagi kapitalis
- ▣ monopoli perdagangan
- ▣ membuat kontrak-kontrak kerja khusus dengan pengusaha untuk pemasokan barang atau pekerjaan konstruksi yang diperlukan negara.
- ▣ menyediakan buruh terdidik dan disiplin

Ketiga, setelah itu berkembang “pakta dominasi” antara para kapitalis utama dengan pemimpin pemerintahan berdasarkan kepentingan bersama. Jadi negara dan klas berjalan bersama membangun sistem kapitalis.

Keempat, kemudian berkembang klas menengah dan pemilik kapital dengan sumber-sumber kekuatan politik yang cukup besar. Suatu saat mereka menganggap: pengendalian ekonomi dan sosial yang dilakukan pemerintah otoriter justru mengganggu kepentingan mereka. Melemahnya “pakta dominan” mendorong munculnya kontradiksi dan konflik antar klas dominan itu dengan negara dan melemahkan basis sosial dari pemerintahan otoriter tersebut.

Kelima, transformasi struktural yang terjadi di dalam negeri itu diperkuat oleh tekanan internasional (ketika negara semakin ikut globalisasi). Di sini kapitalisasi internasional berkepentingan dengan rezim demokrasi. Sebab:

1. rezim demokrasi lebih menjamin perpindahan barang, tenaga, dan kapital lebih bebas
2. menjadi demokrasi dipandang sebagai jalan untuk membuka pasar domestik
3. banyak elit negara Dunia III menganggap demokratisasi sebagai sarana penting untuk mendukung keinginan mereka menjadi anggota klub internasional negara-negara maju.
4. bisa mendorong ke arah liberalisasi ekonomi dan politik.

Keenam, sekitar tahun 1980-an negara-negara otoriter melemah karena krisis ekonomi yang beruntun. Defisit neraca pembayaran semakin besar. Hutang luar negeri semakin besar. Inflasi dan krisis fiskal akhirnya mendorong pembangunan kepada borjuasi kota. Karena itu demokrasi adalah cara untuk mengajak pihak lain untuk menanggung beban tanggung jawab dan menghindari ketidakpuasan masyarakat.

Sementara itu Goran Therborn menganggap ada peran kapitalis dalam proses demokrasi. Pertama, kecenderungan kapitalisme, secara inheren, melahirkan demokrasi, sebab:

-kapitalisme menciptakan:

- a. pasar tenaga kerja "bebas"
- b. memberi landasan yang bisa dipakai buruh untuk memperjuangkan nasibnya.

-hubungan produksi kapitalis cenderung menciptakan klas penguasa yang secara internal saling berkompetisi dan terpecah belah, tetapi hidup berdampingan secara "damai". Mereka terpecah dalam berbagai faksi:

- a. pedagang
- b. bank
- c. industri
- d. pertanian

Dari berbagai tesis di atas tampak kalau peran klas menengah atau borjuasi cukup besar dalam menentukan perubahan negara dan demokrasi. Indonesia klas menengahnya sebanyak 14 juta (8%), Thailand 6,2 juta (12%), Philipina 7 juta (12%), Malaysia 2,5 juta (15%), dan Singapura 1,4 juta (50%).

Menurut Arief Budiman hubungan antara klas menengah dan demokrasi tidak langsung. Ia masih bergantung beberapa hal, yaitu *pertama*, jumlah klas menengah besar atau kecil. Semakin banyak klas menengah semakin potensial proses demokratisasi terjadi. *Kedua*, Peranan negara terhadap lahir dan berkembangnya klas menengah besar atau kecil. Di Indonesia sektor ekonomi masih didominasi negara. Menurut laporan Kompas (18 April 1995) berdasarkan penjualan 300 perusahaan besar pada 1993,

perusahaan negara menguasai 51,8%. Sisanya dikuasai perusahaan swasta domestik (37,8%) dan perusahaan patungan dengan perusahaan asing (10,4%). Dengan demikian perekonomian masih didominasi negara. Hal ini memperkecil peran kelas menengah untuk menjadi aktor demokrasi.

Ketiga, komposisi perusahaan besar Indonesia didominasi pengusaha keturunan Cina. Sedangkan perusahaan milik pribumi didominasi pengusaha keluarga pejabat. Akibat dari bangunan kelas menengah di Indonesia macam itu maka kelas menengah Indonesia lemah dalam berperan sebagai aktor demokrasi. Mereka lahir dari dalam negara.

Karena itu dalam proses reformasi 1998, proses menjatuhkan presiden Soeharto, yang memegang peran besar bukan kelas menengah yang berasal dari pengusaha. Mereka sangat pasif. Kalau toh berperan hanya sebatas fasilitas kepada kelompok reformis berupa makanan, minuman, dan fasilitas lainnya. Mereka tak mampu melakukan transformasi basis ekonominya ke dalam aksi politik.

Akibatnya yang mengambil peran besar dalam proses menjatuhkan presiden Soeharto adalah para mahasiswa (calon kelas menengah), cendekiawan independen dan kritis kepada negara, intelektual kampus, gerakan buruh, gerakan LSM yang telah lama menjadi kekuatan kritis negara dan pejuang HAM dan demokrasi, dan media massa yang aktif dan kritis.

Konstelasi global kekuatan politik macam inilah yang tampak dari 48 parpol yang diperbolehkan menjadi kontestan pemilu 1999.

3. Dua Model Pemilu

Pemilu dalam negara otoriter berarti proses legitimasi. Bukan proses perubahan sosio-ekonomi dan politik, tetapi proses mengukuhkan kembali kekuasaan negara. Negara macam ini berusaha melegitimasi kembali kekuasaannya secara periodik (untuk Indonesia 5 tahun sekali). Karena itu negara memerlukan instrumen politik untuk alat legitimasi tersebut.

Indonesia, di bawah rezim Soeharto, menemukan instrumen legitimasi politik 5 tahunan itu dalam diri Golkar. Karena itu rezim ini mengatakan menjelang pemilu 1971: pemilu boleh dilakukan, tetapi harus menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Dan setiap kali menjelang pemilu, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 ucapan itu selalu dikatakan. Artinya negara Orde Barunya Soeharto harus tetap menang.

Model pemilu macam ini adalah model pemilu mobilisasi, dimana semua lapisan masyarakat dimobilisir untuk ikut pemilu demi terlegitimasi suatu format sistem kekuasaan negara. Karena itu negara hanya memerlukan "upacara besar" atau "pesta besar" 5 tahun sekali untuk melestarikan kekuasaannya. Pemilu di negara otoriter berarti pemilu untuk mempertahankan status-quo. Pemilu macam ini arah proses politiknya dari atas ke bawah. Negara yang memerlukan legitimasi melalui pemilu.

Negara memerlukan pemilu di samping untuk alat legitimasi politik juga untuk selalu mengkonsolidasikan dan kalau perlu merevisi para elit negara yang ada di dalam inner circle. Negara macam ini merasakan selalu 5 tahun proses pembangunan dan proses pemerintahan sering terjadi perubahan dan pergeseran. Supaya perubahan dan pergeseran dalam masyarakat itu tidak mengancam keutuhan kekuasaan negara maka pemilu harus tetap dilakukan dan sebisa mungkin diselaraskan dengan perubahan elit disekitar

Presiden. Karena itu kalau kita perhatikan, inner circle presiden sering berubah-ubah, meskipun presiden dan policy otoritariannya tidak berubah. Wakil presiden selalu dirubah. Para menteri "datang dan pergi". Sehingga makna perubahan dan makna demokrasi berasal dari "atas".

Sedangkan pemilu di negara demokrasi berasal dari bawah. Artinya selama kurun waktu tertentu masyarakat mengalami perubahan dan pergeseran akibat proses pembangunan, proses pemerintahan, dan proses industrialisasi. Akibatnya legitimasi kekuasaan negara harus ditinjau kembali untuk memadukan dengan perubahan masyarakat. Dari konteks macam inilah pemilu diselenggarakan oleh negara Demokrasi. Artinya pemilu diselenggarakan tatkala masyarakat memerlukan legitimasi baru bagi negara akibat perubahan dan pergeseran dalam kehidupan berbangsa.

Pemilu diperlukan untuk memformulasikan dan kemudian mengimplementasikan berbagai aspirasi rakyat yang telah berkembang dan berubah itu. Mereka menganggap sarana formal dan demokratis untuk menampung dan mewartakan perubahan dan pergeseran dalam masyarakat adalah pemilu. Karena itu pemilu berlangsung dari "bawah ke atas". Bukan sebaliknya.

Sehingga makna pemilu adalah partisipasi rakyat untuk memformulasikan perubahan nilai yang sedang terjadi oleh negara. Sehingga model policy negara akan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakatnya secara periodik. Akibatnya, dalam sistem pemilu macam ini ketidakpastian siapa yang menang dan yang kalah sulit diterka. Beda dengan pemilu dalam negara otoriter, siapa yang menang dan kalah jauh hari sudah bisa ditentukan.

Karena itu pemilu dalam negara otoriter memerlukan pemilih yang banyak, mobilisasi. Berhasil atau tidaknya pemilu ditentukan oleh banyak atau tidaknya massa dimobilisir. Sedangkan negara demokrasi juga memerlukan banyak orang untuk memilih, tetapi kualitas penyelenggaraan pemilu yang paling diharapkan. Akibatnya suara pemilih di negara otoriter sangat banyak (nyaris 100% pemilih). Sedangkan pemilih di negara demokrasi sangat kritis sehingga jumlahnya terbatas, tetapi kualitasnya bagus (pemilih sekitar 60-70% sudah merupakan angka partisipan yang tinggi).

Indonesia sejak rezim Soeharto runtuh bersiap-siap masuk ke model pemilu negara demokrasi. Revolusi partisipasi untuk kritis kepada negara dalam 1 tahun terakhir luar biasa. Dari tolok ukur parpol, dari 3 parpol menjadi sekitar 148 parpol baru merupakan lonjakan yang luar biasa. Meskipun oleh negara ditentukan 48 parpol kontestan pemilu, antusiasme masyarakat untuk mengorganisir diri dan melakukan tekanan politik kepada negara sangat fantastik.

Nyaris setiap 2-3 hari lahir 1 parpol sejak Soeharto runtuh. Terjadi perubahan mendasar dalam masyarakat: hegemoni negara runtuh dan revolusi harapan-harapan meningkat masyarakat terus tumbuh. Karena itu nyaris hampir semua komponen masyarakat Indonesia mengorganisir diri dan kemudian meramai-ramai mendeklarasikan menjadi parpol baru. Perubahan mendasar sedang terjadi dalam diri mereka. Yang dulu tak pernah diperbolehkan, tetapi saat ini semua dilepaskan dan cenderung tak terkontrol. Akibatnya mereka bergerak mendekati kekuasaan dengan kendaraan: parpol.

Sejak rezim Soeharto berkuasa telah terjadi perubahan penting di sektor masyarakat. Masyarakat Islam secara gradual, baik yang di desa maupun yang di kota secara gradual mengalami perubahan ekonomi. Sedikit demi sedikit mereka tumbuh, baik

di bidang ekonomi, budaya, sosial, maupun politik. Tak heran kalau jumlah masyarakat Islam yang bersekolah semakin banyak. Bahkan peledakan sarjana muslim: S1, S2, dan S3 terjadi 10 tahun terakhir.

Masuknya mereka dengan deras ke sektor non-agama menyebabkan tumbuhnya birokrasi dan negara yang adaptif terhadap nilai keagamaan. Birokrat Indonesia di tingkat propinsi ke bawah di jaman Orla adalah orang "abangan", yang afiliasi politiknya ke PNI. Sejak Orba mereka di Golkarkan. Setelah anak-anak Islam yang bersekolah semakin meluas dan masuk ke birokrasi maka sejak awal 1990 birokrasi Indonesia mulai berubah. Nilai Islam mulai berkembang pesat. Sedangkan anak keturunan abangan mulai pensiun. Karena itu biasanya kalau ada Lurah pensiun biasanya kembali PDI (FNI), induknya dulu. Utamanya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dalam batas tertentu faktor ini pula yang menyebabkan terjadi "ketegangan politik" primordial (Islam lawan katolik, Islam modern lawan Islam tradisional) sejak awal 1990-an. Kekuatan status-quo di luar Islam sangat terusik sekali dengan berkembangpesatnya orang-orang Islam ini. Hampir setiap pembahasan Rancangan Undang-Undang yang dilemparkan dikupas dalam konteks konflik primordial.

Persaingan politik primordial ini berlangsung terus sepanjang 10 tahun terakhir di bawah proses pembangunan ekonomi yang kakuh. Kekuatan Islam yang telah mengalami semacam "pencerahan", akibat diskursus" secara terus menerus di perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri, menyebabkan mereka mulai rasional untuk memahami hubungan antara politik dan Islam di satu sisi dan di sisi lain antara hubungan umat dan negara.

Akibatnya banyak diantara kelompok Islam untuk merujuk kembali nilai dan kekuatan politik Islam di jaman Orde Baru, tetapi selalu mengalami kesulitan urgensi, aktualisasi, dan faktualisasi. Hal ini yang bisa menjelaskan kenapa anak-cucu Masyumi, keponakan dan sepupu Masyumi tidak lagi berdiri dalam suatu norma yang ketat seperti dulu. Diantara mereka langsung mendirikan parpol bernuansa seperti Masyumi, tetapi tak bisa sebesar Masyumi. Justru diantara mereka ikut mendirikan partai yang heterogen, nasional, ada aspek Islamnya, progresif, dan universal macam PAN (Partai Amanat Nasional).

Karena itu PAN adalah gejala dari komunitas Islam modern yang melihat perubahan sosio-ekonomi, kultural, dan politik yang dihadapi saat ini telah berubah sehingga tak mungkin lagi melahirkan Masyumi seperti jaman Demokrasi Parlementer. PAN menjadi sangat cepat besar dan memperoleh banyak simpati karena komunitas Islam yang di sana sedang mengalami perubahan. Justru PBB, Masyumi, dan Masyumi Baru yang dianggap sebagai simbol (atau diharapkan sebagai harapan berkembangnya Masyumi lama) kekuatan politik Islam lama yang kuat, tetapi tidak memperoleh sambutan besar di mata masyarakat.

Karena itu PAN sangat jauh diidentikkan dengan Masyumi baru. Begitu pula PBB, Masyumi, dan Masyumi Baru bukan dengan sendirinya adalah jelmaan kembali Masyumi dulu. Mereka semua adalah gejala kekuatan Islam baru yang sangat berbeda dengan kekuatan Islam lama. Begitu pula nilai-nilai dalam PKB sangat berbeda dengan nilai dan kecenderungan partai NU jaman Demokrasi Parlementer. Apalagi NU sayapnya Gus Dur. NU sayapnya Gus Dur sangat modern, pragmatis, dan progresif. Dan kekuatan itulah yang sedang ada dalam PKB yang diback up oleh lautan komunitas NU lama.

Di sisi lain, kekuatan abangan, dari kalangan PNI sejak rezim Soeharto dipinggirkan. Akibatnya selama 32 tahun mereka banyak bergerak di luar birokrasi, meskipun sebenarnya kelompoknya masih banyak di birokrasi negara, meskipun sudah di-Golkar-kan. Pengalaman dan perjalanan di luar negara itu yang menyebabkan mereka mempunyai harapan besar dengan tumbanganya Soeharto. Bukan suatu kebetulan kalau mereka banyak berperan dalam proses menjatuhkan Soeharto tempo hari.

Saat ini adalah harapan mereka untuk bangkit kembali, memunguti kekuatan-kekuatan mereka yang tercecer di jalanan, termasuk menghimpun kekuatan Katolik, Protestan, dan para Barisan Sakit Hati. Bukan sesuatu yang aneh kalau mereka, kelompok PNI, abangan, dan katolik dan protestan berusaha menghitung kembali kantong-kantongnya dulu.

Tapi PDI sejak pemilu 1987 merupakan PDI baru yang telah "diramu" dengan brilian oleh kekuatan katolik sehingga muncul menjadi kekuatan yang sangat mengejutkan. Sejak saat itulah negara sangat hati-hati dengan PDI. Karena itu PDI Perjuangan bukan lagi seperti PNI lama. PDI Perjuangan juga merupakan gejala partai baru sejak jaman Orba.

Sementara itu kekuatan militer yang selama 32 tahun menjadi inti kekuatan negara mulai kebingungan. Selama 6 kali pemilu Orba mereka "menunggangi" Golkar sehingga bisa berkuasa lama. Saat ini, tatkala format kekuatan negara mulai bergeser: dari negara ke parpol, maka ABRI sangat kesulitan untuk bermain politik model "injak kaki". Sangat kelihatan kalau ABRI ragu-ragu terhadap kekuatan Golkar. Baik di tingkat Jakarta hingga di kotamadya mereka mulai memeralat atau "minta tolong" kepada kekuatan partai lain. Mereka "main mata".



Tabel 1: Klasifikasi Parpol atas Dasar Program

NO	SASARAN PROGRAM	JUM LAH	KETERANGAN
1	Untuk Buruh dan/Tani dan/Nelayan dan/Sektor Informal	9	MURBA,PBN,PPI,PBI,PRD,PSP,PD R,PADI, dan Partai SPSI
2	Untuk Anak Yatim Piatu	1	Partai ABUL YATAMA
3	Mempertahankan Negara Kesatuan, Memperjuangkan Aspirasi dan Kedaulatan Rakyat	18	PPP (asasnya Islam dalam negara kesatuan), PDI Perjuangan, Partai Golkar (ditambah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pengembangan ekonomi rakyat), PND (ditambah mempertahankan UUD 1945 dan Pancasila), PKP, PDI-BH, Partai Republik (ditambah mengatasi krisis nasional, stabilitas politik, dan menegakkan wibawah pemerintah), PKB (ciri humanisme-religius), Partai MKGR (ekonomi rakyat), KRISNA (mempertahankan dwi-fungsi ABRI, Pancasila, dan UUD'45), PNI Massa Marhaen, Partai Rakyat Indonesia, IPKI (mempertahankan dwi-fungsi ABRI), PNI-Supeni, PILAR, PNBI, PNI-Front Marhaen, PKM
4	Menegakkan Nilai Islam dalam Negara Indonesia	16	PSII, Partai Keadilan, PBB, Partai Cinta Damai, Partai NU, PUI, PUMI, PKU, SUNI, Partai Persatuan, Masyumi Baru, KAMI, Masyumi, PID, PSII 1905, PIB

Dari tabel di atas tampak sekali kalau dari 48 parpol yang programnya difokuskan untuk klas bawah sangat terbatas. Ini tidak berarti banyak parpol yang tidak didukung klas bawah. Tapi dari program mereka tak banyak yang untuk klas bawah, meskipun tetap didukung klas bawah. Begitu pula yang berorientasi ke nilai Islam sangat banyak. Dari parpol "besar" seperti PPP, PAN, PKB, dan PBB mempunyai basis dukungan umat Islam. Tapi secara ideologi politik mereka tetap mengalami polarisasi.

Wajah lain dari 48 parpol peserta pemilu 1999 adalah munculnya kembali gejala politik aliran. Mungkin banyak terjadi variasi jika dibandingkan dengan gejala politik aliran ditahun 1950 dan 1960-an. Tetapi dasar-dasar primordialnya relatif masih tampak. Gejala itu semakin kentara tatkala pemilu telah usai. Hasil perolehan suara fantastis dari PDI-P, sekitar 36-40%, dan perdebatan tentang calon presiden menunjukkan varian

kultural masih terasa, meskipun polanya sedikit berbeda. Pola konfliknya semakin kompleks dan memenuhi pola lateral. Lihat tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2: Komposisi Ideologis Parpol Kontestan Pemilu 1999

No	Format Ideologis/Masa	Jumlah	%	Keterangan
1	"Berbau" Nasionalis (PNI)	6	12,5	PDI Perjuangan, PND, PDI, PNI-Massa Marhaen, PNI-Supeni, PNI-Front Marhaenis (Partai-partai ini banyak berwarna PNI, meskipun saat ini sudah sangat banyak varian pragmatismenya. Dan juga ada yang berbau nasionalis radikal)
2	"Berbau" Islam/Partai Islam	19	39,58	PPP, PSII, Partai Keadilan, Partai Cinta Damai, PKB, PBB, PAN, Partai NU, PUI, PUMI, PKU, SUNI, PP, Masyumi Baru, KAMI, MASYUMI, PID, PSII 1905, PIB (Partai-partai Islam ini sangat heterogen: ada yang bersinkretis dengan tradisional Jawa, ada yang lebih berbau sosialis demokrat, dan ada yang Islam "modern")
3	Partai Katolik/Protestan	2	4,17	KRISNA, PKD. Di samping 2 parpol ini orang katolik dan protestan dan keturunan Cina membikin partai PDKB (Partai Demokrasi Kasih Bangsa)
4	"Berbau" militer	3	6,25	PKP, IPKI, Partai MKGR (partai-partai ini juga bersifat nasionalistis, dalam arti lebih mengarah format Nation-state). Di samping itu beberapa jenderal purnawirawan "mempunyai parpol asuhan" yang bernama Partai Kebangsaan Merdeka.
5	Berbasis Buruh	5	10,42	PBN, PPI, PRD, PSP, Partai SPSP (partai-partai ini ada yang bersifat sosialis demokrat, nasionalis radikal, dan Islam)
6	Bersifat Kebangsaan	6	12,5	Partai Kebangsaan Merdeka (PKM), Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (PBI), Golkar, PILAR (Partai Pilihan Rakyat), PNBI (Partai Nasional Bangsa Indonesia),
7	Bersifat LSM	4	8,33	PADI (Partai Aliansi Demokrat Indonesia), PDR (Partai Daulat Rakyat), Partai MURBA, Partai Rakyat Indonesia (PARI)

Sementara itu Daniel Dakhidae memformulasikan parpol peserta pemilu menggunakan gabungan antara garis aliran dan klas. Sebenarnya format Daniel Dakhidae menggunakan bentuk dasar peta kekuatan politik Herbert Feith. Menurut Daniel Dakhidae peta 48 parpol peserta pemilu bisa dipilah dalam dua garis: aliran dan klas. Dalam peta dua aliran itu digambarkan dalam dua sumbu, yaitu sumbu vertikal dan horisontal. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub: kutub yang berdasarkan agama dan kutub yang berdasarkan kebangsaan. Sedangkan sumbu horisontal memisahkan 2 kutub berdasarkan klas: developmentalisme dan sosialisme radikal.

Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengambil jalur klas, baik dalam kritik ideologi maupun metode kerjanya. Beberapa partai buruh juga mengambil jalur "klas". Termasuk beberapa parpol yang memilih Marhaenisme sebagai ideologinya. Sedangkan jalur developmentalisme diformatkan pada Partai Golkar. Sedangkan sumbu vertikal menarik 2 aliran yang berbeda: aliran berdasarkan agama Islam dan kristen. Delapan belas parpol berdasarkan agama, baik berdasarkan azasnya maupun pendukungnya (konstituen).

Di kutub lain muncul parpol berdasarkan kebangsaan: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sedangkan PAN, PKB, dan PUDI mengambil posisi di tengah antara agama, kebangsaan, dan klas. Kita lihat gambar di bawah ini.

Dari semua parpol peserta pemilu, 15 parpol memiliki asal-usul yang bisa ditelusuri sampai ke partai angkatan pertama sebelum perang dan tahun 1950-an, 8 parpol bisa dianggap memiliki hubungan emosional dengan parpol terdahulu yang tidak dengan sendirinya memegang mandat untuk melanjutkan parpol itu. Selebihnya sekitar 52% adalah parpol baru dari angkatan baru dengan pemikiran politik baru (Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program, Kompas, 1999).

BAB III

PEMILU DAN KEKERASAN POLITIK

Sejak rezim Soeharto runtuh, sebagai simbol runtuhnya otoritarian maka lemah pula kekuatan negara. Kekuasaan Soeharto yang 32 tahun memegang teguh format 3 parpol, tetapi hakekatnya berwajah satu parpol hegemonik dengan Golkar selalu memegang *single majority* di parlemen. Kekuasaan Golkar yang mayoritas dan “tunggal” menjadi instrumen rezim Soeharto dalam setiap pemilu 5 tahun sekali. Namun tatkala rezim Soeharto runtuh maka runtuh pula hegemonik negara Orde Baru.

Sejak B.J Habibie diambil sumpah menjadi presiden, 21 Mei 1998, menggantikan Soeharto, banyak problem yang menimpah pemerintahannya. Tanggal 30 Mei 1998 presiden B.J.Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang menyertakan 3 orang Menteri di luar Golkar yaitu A.M Saefuddin (PPP), Hamzah Haz (PPP), dan Panangian Sireger (PDI Budihardjono).

Rezim B.J Habibie yang sejak awal menerima terpaan dari berbagai kelompok, masih menganggap bagian dari rezim Soeharto. B.J Habibie dianggap masih kroni Soeharto. Habibie dianggap sementara orang belum bersih dari KKN. Karena itu dianggap kesulitan meluluskan tuntutan para mahasiswa dan kelompok tertentu untuk mengadili Soeharto.

Banyak hal telah dibikin rezim B.J Habibie ini. Awal pemerintahannya telah dibebaskan puluhan tahanan politik dan narapidana politik. Meskipun beberapa tapol dan napol ada yang belum dibebaskan, tapi mengeluarkan ratusan napol dan tapol hingga akhir 1998 agak melegakan masyarakat.

Di samping itu rezim ini juga mencabut SIUPP, faktor yang menjadi momok masyarakat pers sejak rezim Soeharto. Akibatnya pers Indonesia dengan cepat meledak: baik jumlah maupun keberaniannya. Dengan cepat tumbuh ratusan koran dan majalah baru. Dan media massa di era reformasi ini apa saja bisa ditulis dan dikritik, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sejak rezim Habibie nyaris setiap hari kita mendengar deklarasi partai baru. Setiap deklarasi partai mereka melakukan mobilisasi massa pendukungnya. Akibatnya kebanyakan deklarasi parpol baru adalah wajah kerusuhan dan ketakutan bagi masyarakat.

Politik mobilisasi massa terjadi dimana-mana. Sampai dengan September 1998 telah dideklarasikan parpol baru lebih dari 120 parpol. Karena itu majalah Tajuk mengadakan jajak pendapat sekitar 500 orang tentang kemerdekaan berpendapat. Lihat tabel di bawah ini:

Tabel 3: Opini Sebagian Masyarakat tentang Kebebasan Politik 1998

No.	Pendapat	%
1	Lebih Bebas	74,2
2	Tidak Bebas	4,6
3	Sama Saja	19,6
4	Tidak Menjawab	1,6
Total		100

Diambil dari Tajuk, 20 Agustus-2 September 1998.

Suasana euforia kemerdekaan berpendapat merata dimana-mana sehingga nyaris setiap hari terjadi unjuk rasa, utamanya mahasiswa. Sejak Soeharto runtuh sudah ada sekitar 7.000 Lurah atau Kepala Desa yang diunjuk rasa masyarakat bersama mahasiswa,

diminta untuk mengundurkan diri. Banyak pimpinan birokrasi berusaha direformasi masyarakat, meskipun sampai hari ini belum banyak yang diturunkan.

Dimasa kekuasaan B.J Habibie, 21 Mei 1998 sampai dengan September 1999, nilai rupiah perlahan-lahan menguat, dari sekitar Rp 15.000/US dollar menjadi sekitar Rp 7.000-Rp 8.000,-/US dollar. Bahkan akhir kekuasaannya sebesar Rp 6.000,- US dollar. Meskipun tetap diperdebatkan kuatnya nilai rupiah itu karena faktor internasional yang jelas nilai rupiah di bawah patokan nilai APBN Revisi, Rp 10.000/ US dollar, memberi keleluasaan masyarakat dan negara. Dan harga sembako naik terus namun tidak terjadi *rush* seperti masa rezim Soeharto.

Untuk pertama kalinya Ketua DPA tidak ditunjuk oleh presiden, tetapi atas dasar pemilihan. Dan yang terpilih dalam pemilihan itu adalah Dr. A.A Baramuli. Dan pemerintah sejak 3 Juli 1998 mencabut semua ketentuan, baik Keppres maupun Inpres, yang menjadi dasar perolehan dana bagi yayasan yang dipimpin mantan presiden Soeharto.

Akan tetapi rezim B.J Habibie masih dianggap ragu-ragu untuk mengadili atas kesalahan-kesalahan Soeharto. Karena itu unjuk rasa mahasiswa untuk isu ini berlangsung setiap hari. Puncaknya tatkala berlangsung Sidang Istimewa MPR 10-13 Nopember 1998. Dalam peristiwa itu terjadi insiden berdarah: ada puluhan mahasiswa, PAM Swakarsa, dan aparat keamanan menjadi korban.

Di samping itu kelompok Barnas (Barisan Nasional) yang merasa tidak pernah percaya dan mengakui legitimasi kekuasaan Habibie menebarkan komunique bersama, yang kemudian dituduh makar. Dan sejak itu kritik dan tuntutan terhadap rezim B.J Habibie dan kepemimpinan Menhankam/Pangab Jend Wiranto ditebarkan terus.

Karena itu rezim B.J Habibie sejak dilantik sampai saat ini selalu menjadi perdebatan tentang legitimasinya. Lemahnya legitimasi rezim B.J Habibie ini jelas mempunyai pengaruh besar bagi roda pemerintahannya ditahun 1999. Apalagi saat melaksanakan pemilu bulan Juni 1999. Di samping lemahnya legitimasi pemerintahan B.J Habibie, mekanisme kelembagaan dan kewibawaan lembaga kepresidenan saat ini dalam kondisi yang paling lemah.

Kelonggaran rezim B.J Habibie dan melemahnya hegemonik negara telah memberi kesempatan luas bagi timbulnya aspirasi politik rakyat. Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat yang luas itu adalah tumbuhnya dengan cepat ratusan parpol baru. Tumbuhnya parpol baru itu sebagai simbol runtuhnya hegemonik negara yang selalu mendominasi dengan format 3 parpol.

Karena itu boleh dibilang tumbuhnya ratusan parpol baru itu sebagai akibat tumbuhnya krisis nasional dan krisis legitimasi rezim. Sehingga banyak parpol merupakan bentuk respon masyarakat atas dominasi negara selama 32 tahun rezim Orde Barunya Soeharto.

Saat ini di beberapa daerah Jawa pedalaman dan orang kota yang abangan mulai berbicara banyak tentang Ratu Adil. Seolah-olah ratu adil itu akan ada dan akan datang. Lebih dari itu seolah-olah ratu adil itu telah nyata-nyata ada. Ini adalah gejala khas masyarakat agraris tradisional. Gejala ini dulu banyak dijumpai dalam masyarakat petani tradisional tatkala mengalami transformasi sosio-ekonomi dan politik yang cepat.

Dalam masyarakat macam ini mistik dan kekuatan gaib menjadi tumpuan kekuatan masyarakat. Sehingga ketika jaman sedang berubah, sedang *gonjang-ganjing*, mereka berpegang pada mistik dan kekuatan gaib. Gejala ini mulai tampak pada perilaku massa

partai politik. Banyak massa partai politik dan kader politik tertentu yang “diisi” kesaktian. Mereka merasa kebal, sakti, dan percaya diri. Ada informasi, di Jawa Tengah partai tertentu sedang memesan ribuan senjata tajam. Ada yang memesan ribuan pentung.

Kalau partai politik berperilaku semacam itu maka pemilu akan datang bisa terjadi bukan adu program, bukan adu konsep tentang negara demokrasi, tetapi akan terjerumus menjadi “perang” partai. Sehingga pemilu dan kampanyenya akan datang bisa mirip peristiwa Sambas, Ambon, Banyuwangi, Timor-Timur, dan Ciamis yang dilegalisir. Sebab massa parpol yang anarki dan fanatik sangat sulit untuk dikendalikan. Apalagi kalau mereka “disuntik” dengan “kesaktian” dan mistik.

Partai politik adalah lembaga politik yang modern, rasional, dan salah satu tolok ukur demokrasi suatu negara. Parpol, salah satunya, yang harus menterjemahkan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat. Karena itu dalam negara yang bertumpuh pada parpol yang demokrasi maka masyarakat akan cepat tumbuh menjadi demokrasi. Sedangkan masyarakat yang bertumpuh pada parpol yang irasional, mistik, dan tradisional maka kecenderungan masyarakatnya juga kurang demokrasi.

Saat ini semakin kuat gejala parpol besar bertumpuh pada kharismatik pemimpinannya. Secara sepintas terasa, parpol baru dan lama yang membesar banyak disebabkan oleh kharisma pemimpinannya. Saya hanya menggarisbawahi gejala yang selalu muncul dalam sejarah sosiologis negara dimana-mana: pimpinan yang kharismatik dan pimpinan yang otoriter itu tipis garis batasnya.

Semula berawal dari pesona pemimpinannya. Semua berawal dari kekaguman pemimpinannya. Tetapi akhirnya, mungkin sekali, terjerumus ke dalam gejala otoritarian. Partai yang diramalkan besar, yaitu PAN, PDI Perjuangan, dan PKB sangat bertumpuh

pada pimpinannya. Suka atau tidak suka PDI Perjuangan sangat memuja Megawati yang "sederhana" itu. Di dalam massa PKB sangat terpesona kepada kharisma Gus Dur. Dan PAN rasanya sangat menyanjung Amien Rais.

Kalau banyak masyarakat berani menghujat, mengolok-olok, dan menuntut Presiden Habibie, Akbar Tanjung, para menteri (memang mereka layak untuk dihujat dan dikritik), dan tokoh-tokoh lain, tapi sangat sulit menghujat, mengolok-olok, dan menuntut Amien Rais, Gus Dur, dan Megawati. Jarang ada orang yang berani mengeritik pedas mereka. Megitu pula media massa: kalau mereka memberitakan jelek kepada tokoh-tokoh itu biasanya langsung dimarahi massa pendukungnya dan korannya tak laku.

Padahal yang mereproduksi secara terus menerus mereka sehingga menjadi kharismatik macam itu adalah media massa. Karena itu media massa saat ini terasa sangat hati-hati dalam memberitakan tokoh-tokoh besar yang akan menguasai negara kelak.

Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah, di tengah-tengah arus reformasi dan harapan besar menuju demokrasi ini masih kuat, dan bahkan semakin meluas, gejala mistisisme dan keprimitifan masyarakat sehingga mirip gejala masyarakat tani abad 19 di Jawa. Baik pimpinan partai dan massa partai memanfaatkan gejala ini dan suasana reformasi untuk merambah kekuasaan negara.

Secara kultural, gejala ini adalah bangunan bawah yang menjadi dasar berkembangnya otoritarian. Gejala bawah ini secara prismatic akan menembus ke tingkat atas sehingga memperluas pimpinan parpol dan nasional yang tak mempan dikritik dan sangat sensitif pada perbedaan pendapat. Ada sesuatu yang serius dan itu bukan berkait dengan pelaksanaan pemilu yang tergesa-gesa, pelaksanaan pemilu yang semrawut, dan

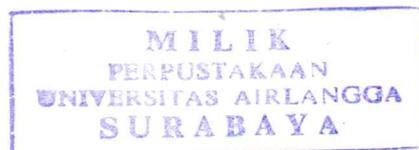
jumlahnya parpol yang terlalu besar. Tapi ada gejala, baik di tingkat bawah maupun di tingkat atas, fenomena otoritarian masih menggelinding diantara kita.

Gejala otoritarian itu untuk sementara ini agak berbeda wajahnya. Kalau jaman rezim Soeharto otoritarian itu diarsiteki oleh negara dengan kekuasaan yang hegemonik, sistematis, dan metodologis sehingga masyarakat menjadi semu perilakunya. Wajah otoritarian negara Orde Baru identik dengan sempurnanya kekuasaan negara. Karena itu didukung oleh kekuatan rasional negara dan aparat keamanan.

Tapi gejala otoritarian ini mulai tampak dari revitalisasi nilai-nilai komunal primitif dari dasar masyarakat agraris tradisional. Arus ini mencuat deras ke permukaan dan bangkit menjadi kekuatan massa etnis yang menakutkan. Peristiwa Ambon, Sambas, Kupang, Banyuwangi, dan Ciamis bukan semata-mata persoalan politik dan tumbuhnya provokator. Lebih dasar dari itu adalah mulai bangkitnya gejala otoritarian masyarakat agraris tradisional yang sangat "memuja" dan fanatik terhadap nilai etnis, agama, dan animisme.

Secara kultural bangkitnya nilai tradisional ini akan membawa konsekuensi pengkutuban kekuatan politik baru. Mereka saat ini masih bisa saling tegur sapa karena ada masa bulan madu. Tapi itu pun terbatas di pucuk pimpinan. Tapi di tingkat bawah, di tingkat *grass-root* konflik kultural mulai semakin seru.

Kalau ini soalnya maka jika kelak formasi kekuasaan pasca pemilu terbukti koalisi beberapa parpol besar maka kendala terbesar berkembangnya demokrasi adalah sulitnya mencari diskursus baru untuk memanager masyarakat bawah yang semakin plural dan semakin kultural ideologis-politis.



Bangunan bawah ini, dan tentu saja akan diwarnai juga oleh faktor ekonomi yang rapuh, membawa konsekuensi bangunan atas negara yang plural, penuh perdebatan, tetapi membuka diskursus tentang hak warga negara agak luas. Tetapi keadaan pasca pemilu belum juga banyak berbicara tentang kemakmuran rakyat dan ketentraman bangsa.

Karena itu demokrasi pasca pemilu pada dasarnya masih sangat transisi. Demokrasi itu masih awal sekali dan masih mungkin berubah lagi dengan cepat. Tapi yang pasti keadaan macam Orba sulit untuk kembali lagi, utamanya masalah "keamanan dan ketentraman" semu. Kita saat ini akan semakin terbiasa dengan kekacauan, konflik, dan ketegangan lainnya. Masa transisi memang penuh gejolak dan penuh ketegangan. Kita bisa saksikan tabel di bawah ini.

Tabel 4: Kerusuhan dan Kekerasan Politik Sebelum dan Sesudah Lengsernya Rezim Soeharto

No	Waktu	Tempat	Korban Orang	Korban Material	Kasus/Beli
1	5 Mei 1998	Medan	tak terdiksi	Puluhan toko, rumah, mobil, dan fasilitas umum hancur	Masalah politik
2	6 Mei 1998	Solo	26 orang tewas	570 sepeda motor hancur, 297 mobil terbakar, puluhan bangunan hancur	Sara dan politik
3	8 Mei 1998	Yogyakarta	122 orang luka	Beberapa fasilitas umum rusak	Politik
4	13-14 Mei 1998	Jakarta	259 orang tewas, isu perkosaan merebak, 6 mahasiswa Trisakti Tewas	1200 bangunan rusak, 400 mobil terbakar	Menuntut Reformasi dan Soeharto lengser

5	26 Juli 1998	Yogyakarta	12 orang luka bacok	Tak terdeteksi	Akibat peringatan 27 Juli 1996
6	25 Agustus 1998	Palu Sulawesi Tengah	14 orang luka	Ransang toko dan rumah rusak	Bentrok pendukung PDIP lawan PDI (Soerjadi) (Politik)
7	1 September 1998	Aceh (Lhokseumawe)	2 orang tewas	Tak terdeteksi	Akibat DOM dicabut (politik)
8	9 September 1998	Jakarta (gedung DPR/MPR)	Beberapa mahasiswa luka	Tak terdeteksi	Bentrok antara aparat keamanan dan mahasiswa (politik)
9	9 September 1998	Surabaya	14 mahasiswa luka	Tak terdeteksi	Merespon kedatangan presiden B.J Habibie
10	18 September - Oktober 1998	Banyuwangi (Jawa Timur)	148 orang tewas 10 orang luka	Beberapa puluh rumah rusak	Pembunuhan dukun santet dan isu ninja. Pembunuhan dukun santet merembet ke Sumenep. Menelan korban 23 orang tewas. Juga di Sampang menewaskan 6 orang. Pemekasan 8 orang tewas. Bangkalan 1 orang tewas. Jember 17 orang tewas. Pasuruan 11 orang tewas. Situbondo 4 orang tewas. Bondowoso 4 orang tewas. Probolinggo 6 orang tewas. Dan Lumajang 8 orang tewas.
11	30 Nopember - 1 Desember 1998	Kupang (NTT)	19 orang tewas 2.324 orang mengungsi.	11 masjid rusak. 142 rumah terbakar. 104 rumah makan terbakar. Puluhan motor dan mobil rusak. Dan beberapa fasilitas umum rusak.	Sara. Ada yang mengedrop ribuan massa untuk menyerbu asrama haji, penduduk Islam, dan tempat peribadatan Islam.
12	13-14 Nopember 1998	Jakarta	14 orang tewas 122 orang luka	Puluhan toko dan kendaraan rusak	Tragedi Semanggi: menentang Sidang Istimewa MPR-1998
13	22 Nopember 1998	Ketapang (Jakarta)	16 orang tewas -puluhan luka bacok	16 gereja dibakar dan rusak. 1 masjid rusak 31 mobil dibakar.	Pertengkaran antara warga Ketapang dan preman

3 sekolah dibakar
1 kantor Koramil Dirusak.
4 kantor bank dirusak.
1 hotel dan sepeda motor rusak.

14	29 Desember 1998	Aceh	138 orang sipil tewas 8 orang ABRI tewas 497 sipil dan militer luka 100.000 orang mengungsi	39 ruko dibakar 2 mobil dibakar 2 pos polisi dirusak	Akibat pencabutan DOM Masyarakat Aceh berusaha balas dendam ke ABRI
15	25-27 Desember 1998	Poso: Sulawesi Tengah	22 orang tewas 60 orang hilang 79 orang luka	500 rumah terbakar	Perkelahian antar pemuda. Seorang pemuda, Ridwan Kamboni, dilukai kelompok Roy Bisalemba di masjid. Segera terjadi amuk massa yang bersifat keagamaan (sara).
16	17 Desember 1998	Jakarta	35 orang (mahasiswa) luka	Tak terdeteksi	Politik
17	2 Januari 1999	ATM BCA, Jakarta	1 orang luka	Beberapa toko rusak	Sara dan politik
18	19 Januari 1999	Ambon	245 orang tewas 471 orang luka berat 122 luka ringan 31.862 orang mengungsi	339 rumah terbakar dan rusak 35 tempat ibadah 16 pasar 4 bank 2 bioskop 184 kios 48 mobil 31 motor 52 toko 312 becak 2 hotel SD kantor pemerintah rusak dan terbakar	Perkelahian antar preman karena rebutan rejeki. Kemudian berkembang menjadi masalah sara sampai saat ini.
19	4-5 Januari 1999	Aceh	9 orang tewas	Ratusan rumah	Politik

				terbakar	
20	7 Januari 1999	Matraman, Jakarta	Puluhan orang terluka	Tak terdeteksi	Perkelahian
21	7-8 Januari 1999	Karawang, Jakarta	2 orang tewas. 36 terluka	6 unit pos polisi rusak. 21 toko rusak 4 super market rusak. 3 hotel rusak 3 mobil rusak 1 motor dibakar	Perkelahian antara tukang ojek dan Serka Nanang Suryana. Tidak mau dipungli, lalu dianiaya. Kemudian berkembang kerusuhan massa.
22	20 Januari-21 Maret 1999	Pontianak (Sambas)	10 orang tewas. 152 luka. 36.600 orang mengungsi	24604 unit rumah dibakar. Puluhan Motor Dirusak	2 orang pencuri (keturunan Madura) yang tertangkap di kampung Parit Setia (Dayak). Seorang pencuri lolos dan melaporkan kepada masyarakat kampung pendatang (Madura). Kemudian sekitar 200 orang Madura melabrak masyarakat kampung Dayak (Parit Setia). Lalu terjadilah perkelahian massal itu.
23	17 April 1999	Jakarta, masjid Istiqlal	4 orang luka ringan	masjid rusak sebagian	Meledakkan masjid Istiqlal.
24	20 April 1999	Ujung Pandang	Tak terdeteksi	gedung gereja mobil dan 3 motor dibakar massa	Sara dan politik
25	12-14 Desember 1998	Solo, Jawa Tengah	4 orang tewas 16 orang luka tembak dan ringan 4 orang aparat luka	2 mobil dibakar. 7 gardu telpon dirusak 2 unit kantor pos dan kantor polisi dirusak	Pemuda trek-trekan dirampas oleh Dalmas. Lalu tengah malam para pemuda menyerbu Mapolres Surakarta dan beringas.
26	11-16 Januari 1999	Luwu, Sulawesi Tengah	28 orang tewas 60 orang hilang	10 rumah dibakar	Seorang pemuda tersenggol saat mengendarai sepeda motor oleh pemuda Kampung Baru. Hal itu menyebabkan tawuran massa antara 2 kampung. Kemudian hal itu merembet ke kampung lainnya.
27	7 Maret-9	Liquica:	52 orang	Tak ada	Rombongan pastor Rafael hendak

April 1999 Timor Timur.

tewas
2 orang
diculik
7 orang luka
2.000 orang
mengungsi

keterangan

menemui Bupati Liquica. Di tengah jalan dihadang oleh kelompok Besi Merah Putih. Terjadi perkelahian massal.

28	31 Maret-1 April 1999	Tual, Pulau Aru	22 orang tewas 39 orang luka 13.000 orang mengungsi	400 rumah terbakar 4 gedung sekolah terbakar Beberapa fasilitas umum dibakar dan rusak	Munculnya selebaran gelap untuk memojokkan agama tertentu. Maka muncullah tragedi berdarah di Dobo, kecamatan Pulau Aru
29	29 April 1999	Bali	Beberapa orang luka	1500 toko dibakar	Akibat ketegangan dan konflik Partai Golkar dan PDI-P
30	Januari 2000	Ambon	Ratusan orang tewas	Puluhan rumah rusak	Konflik sara berkelanjutan
31	Januari 2000	Mataram	Puluhan orang tewas. Puluhan orang luka	Puluhan rumah rusak	Diduga solidaritas umat Islam atas kasus Ambon

Ada perbedaan mencolok antara pemilu 1997 dan 1999. Dalam pemilu 1997 kontesannya hanya 3 parpol: PPP, Golkar, dan PDI. Sedangkan dalam pemilu 7 Juni 1999 nanti kontestan pemilunya sebanyak 48 parpol. Dalam pemilu 1997 menggunakan sistem proporsional yang masih memberikan kekuasaan penuh kekuasaan Jakarta. Sedangkan dalam pemilu 1999 sistemnya campuran: proporsional dan distrik, dimana Daerah Tingkat II diberi kekuasaan menentukan wakil atau kandidatnya.

Dalam pemilu 1997 penyelenggara pemilu adalah pemerintah. Pemilu 1999 memberi tempat yang kuat kepada parpol peserta pemilu, tokoh masyarakat, pemerintah, dan mahasiswa./PT sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu. Pemilu 1997 pemilih "diwajibkan" dengan cara dimobilisir oleh Pantarlih (panitia pendaftaran pemilih). Pantarlih aktif mendaptari para pemilih. Sedangkan dalam pemilu 1999 mendasarkan pada ketentuan: milih adalah hak. Karena itu Gastarlih (petugas pendaftaran pemilih)

tidak boleh memaksa masyarakat untuk mendaftar. Masyarakat di daerah baik fasilitas dan baik perkembangan inisiatifnya harus aktif mendaftar. Karena itu memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Kecuali untuk daerah yang sulit dijangkau dan masyarakatnya masih lemah perkembangan inisiatifnya maka Gasterlih diharuskan aktif.

Perbedaan lain, dalam pemilu 1997 negara masih kuat. Negara melakukan reproduksi kekuatannya kembali pada saat peristiwa Kudatuli (kerusuhan 27 Juli 1996). Karena itu negara dalam posisi kuat sekali. Sehingga tak heran kalau Golkar dalam pemilu 1997 memperoleh suara 74,54%. ABRI masih solid dan tetap kuat "memanage" masyarakat. Sedangkan pemilu Juni 1999 nanti posisi negara mulai melemah. Rezim Soeharto runtuh dan ABRI mulai dihantam kiri-kanan akibat perilakunya dijamin Orba. Akibatnya ABRI dan pemerintah dalam pemilu Juni 1999 nanti hanyalah satu elemen penting dari elemen penting lainnya.

Akibatnya simbol-simbol negara dalam pemilu mulai "dibongkar" dan dikuasai parpol kontestan pemilu. KPU didominasi orang-orang di luar negara. Bahkan keputusan-keputusan yang dibikin KPU sangat independen dan kritis kepada simbol-simbol negara. Belajar dari pengalaman pemilu masa Orde Baru maka lembaga-lembaga dan norma-norma yang menguntungkan Golkar "didodosi" oleh kekuatan parpol di luar Golkar. Sangat kentara, pemilu 1999 adalah kompetisi partai Golkar berhadapan dengan 47 parpol. Mereka berusaha "merebut" daerah-daerah yang banyak menguntungkan Golkar dimasa lampau. Kita bisa lihat tabel di bawah ini lembaga apa saja yang ikut mensukseskan Golkar dalam pemilu Orba, utamanya di tingkat bawah:

Tabel 5: Pelaku Kecurangan Pemilu versi PPP di Jawa Timur 1992-1997

No	Aktor/Lembaga Pelanggar Pemilu	Frekuensi	Keterangan
1	KPPS	32	Aktivitasnya: manipulasi penghitungan suara, menolak OPP lain, masuk untuk mencobloskan, intimidasi, mencoblos ganda, dan menolak orang bawa formulir AB
2	Aparat Desa	27	
3	Masyarakat (simpatisan parpol tertentu)	12	
4	Hansip/keamanan desa	6	
5	Guru	4	
6	ABRI	3	
7	Camat	3	
8	Aktivis Golkar	2	
9	Purnawirawan ABRI	1	

Dari data di atas tampak sekali di desa lembaga paling “ujung” yang mengurus pemilu sangat besar melakukan pelanggaran. Karena itu Gastarlih dalam pemilu 1999 tidak lagi diketuai oleh pegawai negeri. Gastarlih saat ini justru banyak di tangan tokoh parpol peserta pemilu atau tokoh masyarakat yang ditentukan oleh musyawarah.

Tabel 6: Pelaku Pelanggaran Pemilu 1992 di Jatim versi PDI

No	Aktor/Lembaga Pelanggar Pemilu	Frekuensi	Keterangan
1	KPPS	43	Aktivitasnya: manipulasi penghitungan suara, menolak OPP lain, masuk untuk mencobloskan, intimidasi, mencoblos ganda, dan menolak orang bawa formulir AB
2	Aparat Desa	44	
3	Masyarakat (simpatisan parpol tertentu)	19	
4	Hansip/keamanan desa	3	
5	Guru	2	

6	ABRI	10	
7	Camat	3	
8	RT/RW	27	
9	Pantarlilh	11	
10	Aktivis dan /massa Golkar	13	
11	Aktivis PPP	1	
12	Bupati	3	
13	Modin	1	

Tabel 6 laporan dari PDI Jawa Timur 1992 tentang pelanggaran pemilu. Dalam pemilu 1997 PDI pecah jadi dua: PDI Suryadi dan PDI Megawati. PDI Megawati yang banyak pendukungnya "memboikot" dalam pemilu 1997. Karena itu data pelanggaran pemilu untuk PDI Suryadi tidak sebesar data tahun 1992. Kebanyakan mereka memperoleh intimidasi dan perlakuan kasar dari massa simpatisan PDI pro Megawati.

Perubahan sistem pemilih: dari pasif menjadi aktif membuat banyak pihak masih bingung. Selama puluhan tahun masyarakat sudah terbiasa dengan sistem pasif. Mereka didaptar. Mereka didatangi. Tetapi hanya sekitar dua bulan lebih masyarakat diperkenalkan sistem pemilih aktif, setelah UU tentang Pemilu No 3 tahun 1999 disahkan.

Selama hampir sebulan masa pendaftaran sangat terasa kalau masyarakat tidak banyak yang merespon, utamanya di kota-kota besar. Melihat gejala macam inilah maka saat ini PPD I Jawa Timur (saya kira juga dilakukan oleh PPD lainnya meski dengan gaya yang berbeda) mengeluarkan Surat Edaran yang "memerintahkan" Gastarlih untuk aktif mendaptar para pemilih. Sebetulnya dari sini prinsip hak mulai bergeser menjadi kewajiban. Mulai terasa kembali ke sistem kewajiban. Gastarlih mulai mendatangi ke rumah penduduk untuk mendaptari calon pemilih.

Sangat terasa di tingkat bawah perubahan sistem dengan sosialisasi yang singkat dan tingkat pemahaman yang rendah, baik masyarakat maupun petugas lapangan,

menyebabkan prinsip-prinsip pemilih aktif untuk pemilu 1999 belum berjalan maksimal. Betapa pun di tingkat elit Jakarta dan para pengamat ingin mempertahankan sistem pemilih aktif, ternyata di lapangan menimbulkan dampak meluapnya Golput (golongan putih).

Dampak lain yang lebih krusial adalah power dalam proses pelaksanaan pemilu ini bergeser: dari birokrasi ke tangan parpol. Ada indikasi, meskipun belum sebesar jaman Orba, para petugas Gasterlih pun mulai "main mata" dengan para simpatisannya sendiri. Terutama di daerah-daerah yang kantong-kantong ideologi politik partai tertentu kuat sekali. Yang jelas inisiatif pendaftaran dan pelaksanaan pemilu lainnya akan semakin terasa, bukan di tangan birokrasi lagi.

BAB IV

RAKYAT MEMILIH MODERAT

Banyak masyarakat dunia kagum menyaksikan perilaku bangsa Indonesia. Pemilu yang diduga banyak orang bakal "ramai", rusuh, dan berdarah. Bahkan diduga kuat, bakal batal. Hal itu beralasan, sebab sebelum pemilu terjadi konflik massa: baik yang berlatar belakang konflik etnis maupun konflik agama, meluas dimana-mana. Di samping itu setiap kelompok dan perorangan berlomba bikin parpol baru sesuai dengan kepentingannya, sesuatu yang sangat tidak disukai oleh rezim Soeharto.

Di sisi lain negara, utamanya Pemerintahan Jakarta mulai lemah dan nyaris tak berwibawa. Akibatnya bangsa Indonesia masuk ke dalam pemilu yang dianggap demokratis, jujur, dan sangat plural itu dengan spekulasi sangat tinggi. Kali ini adalah pemilu tanpa kekuatan TNI yang ketat dan dimana-mana polisi "berdiri" di balik lembaga sipil, seperti Panwaslu dan PPI dan PPD. Alias ketakutan dengan massa parpol.

Menyadari lemahnya peran negara dan TNI maka semua parpol peserta pemilu, dalam tingkatan atas hingga di daerah-daerah, didorong untuk membuat kesepakatan bersama, membuat batas-batas tindakan mereka sendiri, dan sekaligus berusaha mengontrol diri mereka sendiri. Karena itu di tiap kabupaten, kotamadia, dan propinsi muncul forum komunikasi (FK) antar parpol. Di tingkat lapangan, merekalah bersama-sama PPD sebenarnya yang paling menentukan kampanye dan pemungutan suara itu "berhasil" dengan baik.

Sangat berbeda dengan pemilu 1997: diawasi negara penuh dan dibatasi kekuasaan ABRI dominan. Akibatnya pemilu menjadi aman, tertib, tetapi penuh prasangka dan ketidakpuasan. Sehingga warna konfliknya vertikal: antara masyarakat atau rakyat dengan negara atau pemerintah. Dan derajat kebenciannya pun sangat besar dan eksplosif.

Ada yang bilang, pemilu Juni 1999, merupakan pemilu anti-klimak. Sebab selama 1 tahun masyarakat kota, intelektual kampus, mahasiswa, dan para politisi menjadi demonstran, ekstra-parlementer (jalanan). Mereka penuh hujatan, penuh ancaman, dan saling mengekstremkan diri sendiri. Akibatnya media massa isinya penuh dengan hujatan dan gugatan. Dan tiba-tiba banyak orang yang kritis dan vokalis. Bahkan diantara mereka berlomba paling reformis.

Menyimak setahun reformasi dan jatuhnya kekuasaan Soeharto, seolah-olah bangsa Indonesia ditentukan sedikit orang yang ada di kota-kota yang "dilanda" media massa. Indonesia selama setahun sangat ditentukan orang-orang kota yang pintar baca, yang rakus baca koran, yang kritis terhadap keadaan, dan yang berkepentingan terhadap gejala perubahan negara. Karena itu kalau mau lihat reformasi Indonesia, lihatlah orang-orang kota dan tokoh-tokoh yang ada di kota: penuh niat merubah. Minimal merubah yang berkuasa. Sehingga muncul tokoh-tokoh reformis yang galak-galak.

Bahkan Amien Rais mengolok-olok pemerintahan B.J Habibie: setelah pemilu akan seperti "bebek lumpuh". Begitu pula tokoh-tokoh "besar" dan vokalis macam Sri Bintang Pamungkas begitu tajam dan jelas konsepnya: membongkar 5 pilar Orde Baru untuk diganti dengan 7 pilar demokrasi. Juga parpol gurem yang reformis, PRD, tak kenal kompromi untuk membongkar rezim Orde Baru.

Tapi beda dengan tokoh “lembut” Megawati Soekarno putri. Tidak banyak yang dilontarkan orang ini. Diajak debat calon presiden tidak mau. Diajak menghujat Soeharto, selalu mengingatkan masa suram bapaknya dulu, karena tak perlu dihujat, tetapi boleh diadili. Diajak merubah UUD 1945 juga tidak setuju. Pidatonya dimana-mana sangat kentara kesederhanaannya. Bahkan banyak yang menganggap tak mempunyai visi reformasi.

Tapi dia adalah “tukang sulap” yang luar biasa. Dia mampu mempesona masyarakat desa, orang bawah, dan untuk sementara menjadi tumpuhan orang-orang kaya yang konservatif di perkotaan dengan kharisma Soekarno. Perilakunya penuh makna budaya, utamanya kultur masyarakat agraris tradisional. Akibatnya ratusan juta orang desa hanya mengenal satu idola dalam perasaannya: Megawati.

Pendekatan kultural itulah yang dilakukan juga oleh Gus Dur. Puluhan tahun Gus Dur faham betul dalam memelihara dan mengembangkan kaum nahdliyin di kantong-kantong Jawa Timur, Jawa Tengah, dan beberapa kantong lain di seluruh Indonesia. Akibatnya, pemilu 1999 adalah pemilunya Megawati dan Gus Dur.

Atas dasar pemikiran di atas maka kita bisa catat beberapa fenomena dalam pemilu 1999:

Pertama, pemilu 1999 merupakan respon “sederhana” orang-orang desa terhadap “hiruk-pikuk” reformasi. Sangat kentara perilaku masyarakat desa (yang sekitar 70-80% itu) identifikasi tokoh lebih penting daripada sederetan konsep dan tuntutan reformasi yang rasional. Bagi masyarakat agraris itu perubahan kekuasaan negara berarti kesempatan untuk kembali ke kultur semula: gejala ratu adil dalam masyarakat agraris tradisional. Kemenangan PDI-P nyaris disetiap sudut desa di Jawa, Sumatera,

Kalimantan, Bali, Ambon, dan NTT merupakan bangkitnya kembali golongan nasionalis partai dan budaya agraris tradisional.

Kedua, sangat terasa semakin banyak masyarakat yang bosan dengan gaya pemerintahan Orde Baru yang terlalu lama dan kakuh. Setelah setahun reformasi (jatuhnya Soeharto) banyak orang kota dan yang kritis merasa ingin "segala sesuatu bisa berubah". Mereka ingin asal bukan Golkar. Apalagi Golkar selama 1 tahun dihujat dan "dikejar-kejar". Jatuhnya Soeharto berarti juga jatuhnya kewibawaan Golkar. Karena itu suasana macam ini memberi ruang besar bagi setiap orang kritis untuk cenderung memilih: "asal bukan Golkar". Karena itu perolehan suara Golkar merosot tajam, tetapi bersamaan dengan itu kenaikan suara PDI-P sangat besar. Begitu pula suara PKB dan PAN.

Ketiga, banyak masyarakat kota yang kaya (di perumahan mewah) yang biasanya konservatif (utamanya orang-orang keturunan Cina) berusaha mencari sandaran baru tatkala Golkar dianggap "runtuh kewibawaannya". Bagi kelompok masyarakat pragmatis macam ini hanya memerlukan jaminan keamanan dan bisnis. Siapa yang dianggap paling bisa memberi jaminan keamanan dan bisnis maka itulah parpol yang dipilih. Artinya kelompok ini mulai independen dalam memilih dari Golkar. Di sini ketekunan dan kepiawaian orang macam Kwik Kian Gie sangat berperan penting.

Keempat, semakin tinggi gejala *political realignment*. Tahun 1999 adalah tahun pindahalih pemilih besar-besaran, baik kelompok masyarakat nasionalis, agama Islam maupun katolik/protestan. Sayap nasionalis dalam tubuh Golkar banyak yang "kembali" dan mungkin juga menyeberang ke PDI-P. Begitu pula sayap nahdliyin banyak yang "lari" dari PPP, baik ke PKB, PKU, PNU, dan Partai Suni. Di sisi lain kelompok Islam

“modern” di dalam tubuh Golkar pun sebagian “lari” ke PAN. Pemilu 1999 adalah pemilu dimana Golkar kehilangan kendali organisasi (karena kewibawaan negara otoriter merosot) terhadap massanya. Sehingga sepanjang 1 tahun reformasi “orang-orang” Golkar banyak yang “diam” dan bersembunyi dari identitasnya. Karena itu oleh Indria Samego dikatakan masih banyak “*silent majority*”. Kemenangan PDI-P pada umumnya “menyedot” suara Golkar yang paling besar. Dengan kata lain banyak orang-orang “abangan”, baik yang dulu dari keluarga PNI maupun nasionalis lainnya (termasuk orang katolik dan protestan) yang balik ke PDI-P (simbol kekuatan nasionalis partai). Masih dalam konteks *political realignment* itu, banyak kompleks polisi dan Angkatan Laut yang suaranya menang PDI-P.

Kelima, kalau disimak lebih dalam pemilu ini merupakan jawaban paling tegas dari masyarakat desa: ada struktur sosio-kultur, politik, dan ekonomi yang sangat berbeda antara klas menengah dan atas perkotaan dan klas petani dan buruh di pedesaan. Melalui pemilu ini sangat kentara kalau reformasi masih sangat jauh untuk berubah menjadi revolusi sosial yang luas. Miniatur yang sangat sederhana: banyak pimpinan parpol baru yang sangat reformis: penuh dengan retorika, argumentasi, hujatan, dan menguasai *public opinion*, tetapi lupa untuk “mengakarkan” kekuatannya ke bawah. Ke masyarakat desa. Ke rakyat. Parpol dalam pemilu tak bisa hanya mengandalkan orang pintar dan klas menengah ke atas. Dalam pemilu yang masih emosional, masih simbolik, masih bersifat agraris angka-angka ditentukan oleh mayoritas masyarakat diam yang berada di pucuk-pucuk gunung. Yang menjungkirkan Soeharto boleh orang kota, tapi yang “membungkam” para radikal parpol dalam pemilu tak lain adalah jutaan massa desa

yang ada di gunung-gunung. Di sini uniknya pemilu di Indonesia. Kita bisa simak gejala ini dari tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7: Perolehan Kursi dalam Pemilu 1999 Sebelum *Stembus Accord*

No	PARTAI	KURSI	%
1	PDI-P	136	
2	GOLKAR	99	
3	PPP	40	
4	PKB	40	
5	PAN	27	
6	PBB	2	
7	PK	1	
8	PKP	0	
9	Partai lain	0	
10	Jumlah	245	

Ada konflik sekitar stembus accord. Pada awalnya tidak banyak parpol yang melakukan stembus accord (SA). SA awalnya hanya dilakukan oleh sekitar 7 parpol Islam sebelum masa kampanye pemilu 1999. SA 7 parpol Islam itu segera didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Sedangkan parpol lainnya belum melakukan SA. Setelah pemilu Juni 1999 ternyata banyak parpol yang memperoleh suara sedikit maka ramai-ramai merasa ikut SA. Kontroversial itu semakin meluas ketika Jacob Tobing, selaku Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia dan juga pengurus teras PDI-P mengeluarkan radio gram yang isinya ada 7 kelompok yang telah melakukan SA.

Radio gram itu segera ditentang oleh kebanyakan anggota KPU dan para wakil parpol. Mereka menganggap tindakan Jacob Tobing itu untuk memperkuat posisi PDI-P dalam DPR maupun MPR. Maka kontroversial pun meluas. Kita bisa saksikan penghitungan suara setelah SA di bawah ini.

Tabel 8: Perolehan Kursi Setelah *Stembus Accord*

No	PARTAI	KURSI
1	PDI-P	154
2	GOLKAR	120
3	PPP	59
4	PKB	51
5	PAN	35
6	PBB	13
7	PK	6
8	PKP	6
9	PDI-BH	2
10	PDKB	3
11	PNU	3
12	PBI	3
13	PDR	1
14	PP	1
15	PSII	1
16	PNIM	1
17	PNI-FM	1
18	PKU	1
19	Jumlah	462

Sedangkan jumlah kursi TNI sebanyak 38 buah.

Tetapi penghitungan itu masih diprotes parpoi Islam. Akibatnya *deadlock*.

Karena terjadi polemik dan konflik yang luas maka akhirnya KPU membuat keputusan membatalkan semua kesepakatan SA, termasuk 7 parpol Islam. Sehingga perolehan suaranya sebagai berikut.

Tabel 9: Perolehan Kursi Akhir Pemilu 1999

No	PARTAI	KURSI
1	PDI-P	153 (-1)
2	GOLKAR	120
3	PPP	58 (-1)
4	PKB	51
5	PAN	34 (-1)
6	PBB	13
7	PK	7 (+1)
8	PKP	4 (-2)
9	PDI-BH	2
10	PDKB	5 (+2)
11	PNU	5 (+2)
12	PBI	1 (-2)
13	PDR	1
14	PP	1
15	PSII	1
16	PNIM	1
17	PNI-FM	1
18	PKU	1

19	PPI MASYUMI	1
20	IPKI	1
21	PKD	1
	JUMLAH	309

Hasil ini ditetapkan PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) 28-8-1999 setelah sebelumnya KPU membatalkan *stembus accord*.

Ada beberapa parpol yang memperoleh suara mayoritas di beberapa propinsi Indonesia. PDI-P dominan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Umumnya wilayah Jawa PDI-P memperoleh suara cukup mencolok. Di Jawa Timur juga didominasi suara PKB. Meskipun di beberapa kabupaten kalah dari PDI-P, tetapi secara umum PKB menang di Jawa Timur.

Sementara itu PAN kuat di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Sedangkan Golkar memperoleh suara cukup banyak di daerah luar Jawa, utamanya di daerah Manasuka Nusantara. Kita bisa saksikan tabel di bawah ini.

Tabel 10: Parpol Terbanyak Dapat Kursi dari Propinsi

No.	PARTAI	PROPINSI	KURSI
1	PDI-P	JAWA BARAT	27
		JAWA TENGAH	26
		JAWA TIMUR	23
		SUMATERA BARAT	10
2	GOLKAR	JAWA BARAT	20
		SULAWESI SELATAN	16
3	PPP	JAWA TIMUR	13
4	PKB	JAWA TIMUR	24
		JAWA TENGAH	10
5	PAN	JAWA BARAT	6

Yang menarik adalah ketika acara penandatanganan Berita Acara Pengesahan (BAP) perolehan suara hasil pemilu 1999 banyak parpol yang tidak mau menandatangani BAP itu. Ada yang menganggap pemilu 1999 banyak kecurangan, karena itu mereka tidak bersedia untuk menandatangani BAP. Ada yang yang semata-mata disuruh pimpinan parol untuk tidak menandatangani BAP. Ada yang menganggap hasil pemilu

1999 tidak demokratis dan banyak *money politics*. Yang menarik adalah sebagian besar parpol yang tidak mau menandatangani BAP adalah parpol yang memperoleh suara sedikit atau sering diolok-olok dengan parpol gurem. Kita lihat tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 11: Parpol yang Bersedia Menandatangani Berita Acara Pengesahan.

No	PARTAI	KURSI	%
1	PDI-P	164	
2	PARTAI GOLKAR	120	
3	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	59	
4	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	51	
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	35	
6	PARTAI BULAN BINTANG	13	
7	PARTAI KEADILAN*	6	
8	PARTAI DEMOKRAT KASIH BANGSA	3	
9	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA	2	
10	PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA	1	
11	PARTAI IPKI	1	
12	PNI MASSA MARHAEN	1	
13	PARTAI DAULAT RAKYAT	1	
14	PARTAI KEBANGKITAN UMMAT	1	
15	PSII 1905	0	0%
16	PARTAI MKGR	0	0%
17	PARTAI UMAT ISLAM	0	0%
18	PARTAI CINTA DAMAI	0	0%

Data diambil dari Tempo, 1-8-1999

Tabel 12: Parpol Yang Menolak Berita Acara Pengesahan

No	PARTAI	KURSI	%
1	PNI FRONT MARHAENIS	1	
2	PARTAI PERSATUAN	1	
3	PARTAI NASIONALIS INDONESIA	0	
4	PARTAI KRISTEN DEMOKRAT	0	
5	PARTAI PILIHAN RAKYAT	0	
6	PARTAI RAKYAT INDONESIA	0	
7	PARTAI SERIKAT PEKERJA	0	
8	PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK	0	
9	PARTAI REPUBLIK	0	
10	PARTAI ISLAM DEMOKRAT	0	
11	PARTAI MURBA	0	
12	PARTAI ALIANSI DEMOKRAT INDONESIA	0	
13	PARTAI UNI DEMOKRASI INDONESIA	0	
14	PARTAI BURUH NASIONAL	0	
15	PARTAI SPSI	0	0%
16	PARTAI SUNI	0	0%
17	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	0	0%
18	PARTAI PEKERJA INDONESIA	0	0%

Data diambil dari Tempo, 1-8-1999

Tabel 13: Parpol yang Belum Jelas Sikapnya

No	PARTAI	KURSI	%
1	PARTAI Keadilan dan Persatuan	6	
2	PARTAI Nahdlatul Ummat	3	
3	PARTAI Bihinneka Tunggal Ika	3	
4	PARTAI Masyumi Baru	0	
5	PARTAI Abul Yatama	0	
6	PARTAI Kebangsaan Merdeka	0	
7	PARTAI Masyumi	0	
8	PARTAI Krisna	0	
9	PARTAI Nasional Bangsa Indonesia	0	
10	PARTAI Indonesia Baru	0	
11	PARTAI Pumi	0	

Data diambil dari Tempo: 1-8-1999

Dari data di atas tampak sekali gejala ketidakpuasan dari berbagai parpol atas pelaksanaan pemilu 1999 masih besar, meskipun banyak pula yang menganggap cukup demokratis. Utamanya para parpol gurem. Di sisi lain ada pula gejala anarki dari parpol gurem, utamanya setelah menyaksikan perolehan suara yang sangat kecil dan semua itu mengecewakan mereka.

BAB V

DARI UTUSAN DAERAH HINGGA TNI

Pergelutan antar parpol dan berbagai komponen sosial dan politik masyarakat tidak hanya berakhir setelah pemilu 1999. Semua lembaga komponen MPR dan DPR menjadi sarana konflik baru dari tiap parpol dan masyarakat. Salah satu kontroversial yang berkepanjangan adalah ketika pembentukan anggota Utusan Golongan (UG) dan Utusan Daerah (UG).

Utusan Golongan (UG) akhirnya ditetapkan juga oleh KPU. Setelah mengalami perdebatan dan kemacetan KPU mampu merampungkan tugasnya menentukan 65 orang dari UG. Dalam rezim Orba penentuan UG biasanya ditentukan secara sentral: lembaga kepresidenan. Akibatnya yang menjadi wakil UG biasanya kelompok masyarakat yang diperkirakan bisa mendukung negara. Minimum mendukung calon presiden tunggal Soeharto.

Kali ini yang menentukan adalah KPU. Lebih unik lagi usulannya dikoordinir oleh Tim 15 yang umumnya dari parpol gurem. Banyak pergelutan saat menentukan parpol gurem itu. Ada dugaan keras, parpol-parpol yang tak mempunyai wakil untuk duduk di DPR maka berusaha keras untuk masuk ke MPR melalui organisasi kemasyarakatan. Mereka berusaha masuk MPR lewat LSM yang mereka bentuk. Karena itu sangat wajar kalau kepentingan dari parpol gurem dan Tim 15 itu besar sekali. Bahkan KPU, yang dipimpin oleh parpol MKGR yang tak dapat secuil kursi pun itu, mengeluarkan keputusan kontroversial: parpol gurem boleh ikut lagi dalam pemilu akan datang.

Tidak heran kalau muncul isu diantara anggota Tim 15 itu banyak yang berfungsi sebagai "makelar politik". Mereka berusaha menge-gol-kan organisasi kemasyarakatan tertentu dengan imbalan uang. Wakil parpol gurem yang menjadi Tim 15 jelas mempunyai posisi yang relatif menguntungkan dalam main makelar politik ini. Tetapi sebenarnya di balik itu ada persaingan politik yang mengarah pada pencalonan presiden akan datang.

Semakin kuat persaingan, semakin tegang perseteruan kubu-kubu calon presiden, maka semakin gampang parpol gurem yang menjadi Tim 15 untuk mengais keuntungan. Rangkaian itu tampaknya akan terus berlanjut hingga SU MPR akan datang. Sebab wakil UG dan parpol gurem berpotensi untuk tetap menjadi faktor penentu pencalonan presiden akan datang.

Dalam SU MPR akan datang ada 3 faktor penentu siapa yang bakal menjadi presiden akan datang. Pertama adalah TNI. Kedua Utusan Golongan. Ketiga Utusan Daerah. Ketiga faktor ini menjadi sangat menentukan disebabkan dalam pemilu 7 Juni 1999 tidak ada 1 parpol pun yang menang mutlak (50% atau di atas 50%). Di samping itu ternyata parpol yang akan mewarnai DPR akan datang terjadi polarisasi yang relatif kuat. Ada kubu-kubu tertentu yang sebenarnya sangat sulit untuk bisa menjalin koalisi.

Akibatnya koalisi diantara parpol itu sendiri belum bisa menentukan kubu mana yang mutlak bisa menang dalam persaingan kursi presiden. Kalau semula ada 2 kubu: kubu Habibie dan Megawati. Maka saat ini muncul kubu Poros Tengah. Poros Tengah (PT) sampai saat ini masih goyah, belum solid, dan belum melembaga. Tetapi sebagai format pemikiran kekuatan politik telah jadi. Apalagi kalau disimak ideologi politik yang mendasari PT itu.

Dalam pergelutan yang seimbang itu maka banyak faktor yang akan menentukan siapa yang menjadi presiden akan datang. Saat ini setiap hari akan tumbuh perkembangan yang mengarah pada format kubu pencalonan presiden. Isu apa saja yang muncul bisa merubah dengan drastis format kubu tertentu. Bahkan kelak isu dan perubahan bisa cepat terjadi dalam SU MPR 1999 kalau ada perubahan faktor secara mendadak. Di sinilah dinamikanya pemilihan presiden akan datang.

Karena konstelasi kekuatan parpol yang terpolarisasi itulah maka setiap tambahan kursi ke dalam kubu tertentu sangat berarti sekali. Akibatnya penentuan UG menjadi sangat sarat kepentingan. Baik kepentingan pragmatis anggota KPU maupun kubu politik tertentu. Begitu pula penentuan Utusan Daerah (UD) kelak pasti penuh dinamika. Sebab setiap propinsi selalu menjadi hitungan setiap kubu. Dari situ "pertempuran" kubu-kubu itu merayap-rayap: dari dalam KPU, dari dalam parpol-parpol besar maupun gurem, dari propinsi ke propinsi hingga ke dalam tubuh TNI.

Penentuan UG kali ini jelas kurang sempurna. Tetapi jika dibandingkan dengan saat rezim Orba jelas lebih baik. Karena wakil-wakil masyarakat yang selama ini belum tersentuh mulai dikutsertakan ke dalam MPR. Suku-suku yang dianggap terpencil diberi jursi MPR. Golongan etnis yang sebenarnya kuat distribusi ekonomi kepada negara kali ini diberi kursi. Dulu golongan macam ini jumbuh dengan golongan pengusaha. Akibatnya yang menjadi adalah wakil etnis, tetapi sekaligus wakil konglomerat. Tetapi saat ini wakil mulai diletakkan pada porsi sebenarnya, meskipun masih belum sempurna. Bahkan ada kesan organisasi yang terlalu dekat dengan rezim disingkirkan. Tidak masuknya KNPI, PWI, dan FSPSI merupakan contoh kongkretnya. Dari sini terasa kekuatan pemerintah tidak mampu mendekati anggota KPU.

Kalau mencermati komposisi UG tampak sekali heterogenitasnya. Belajar dari pemilu 7 Juni 1999 belum tentu lembaga yang dulu pendukung Golkar saat ini otomatis mendukung kubu Habibie. Hampir diberbagai lapisan masyarakat, termasuk asrama TNI, banyak juga yang mendukung PDI-P. Kalau dulu golongan veteran dan para perintis kemerdekaan cenderung mendukung Golkar maka saat ini sangat bergantung bagaimana detik-detik terakhir kelak kubu-kubu tertentu mendekati mereka. Atau sejak ditetapkan daftar UG maka kubu yang berambisi meloloskan capres cepat-cepat mendekatinya.

Dari 9 golongan yang telah ditetapkan KPU kira-kira mereka cenderung ke kubu mana saja, hal itu sangat bergantung dari cara kubu itu mendekati dan merayunya. Tetapi perkiraan kasar kubu Habibie unggul di 3 golongan besar (katakan dengan angka minimal 60%): Golongan Agama, Golongan Pegawai Negeri Sipil, dan Golongan Ekonomi dan Badan-Badan Kolektif. Kalau kubu Habibie mencapai angka di atas 60% dari kubu besar itu maka kubu ini bisa unggul dalam merebut suara UG. Sebab golongan veteran, perintis kemerdekaan dan pejuang ; golongan penyandang cacat; golongan etnis minoritas; golongan perempuan; golongan LSM; dan golongan budayawan, ilmuwan, dan cendekiawan posisinya masih 50%-50%.

Posisi Habibie sebagai presiden masih mempunyai keleluasaan khusus dalam mendekati golongan-golongan tersebut. Apalagi pemerintah mempunyai birokrasi, kalau diandaikan birokrasi itu masih efektif dikendalikan negara. Karena itu posisi capres negara dalam kondisi macam ini masih punya banyak peluang.

Tetapi yang menarik adalah kepopuleran Megawati semakin tak terbendung. Saat ini bisa dikatakan Megawati adalah capres yang paling populer dan kans terbesar jika dihitung dari *public opinion*. Sebenarnya posisi keuangan kubu PDI-P nyaris berimbang

dengan keuangan kubu Habibie. Mereka sama-sama potensial memobilisir dana untuk kepentingan SU MPR. Tetapi faktor kepopuleran dan sedang menjadi mode memberi peluang tersendiri bagi Megawati.

Sangat terasa dari hari ke hari kelompok masyarakat yang semula meragukan Megawati mulai memperhitungkan kembali tatkala melihat strategi dan kejelian Tim Sukses Megawati yang relatif bermain cantik. Seorang Megawati yang sangat sederhana, namun kharismatik bisa "dikemas" menarik oleh Tim Sukses PDI-P. Ini faktor yang tidak dipunyai kubu Habibie. Apalagi saat ini kubu Habibie sedang dilanda konflik internal yang sistematis.

Tentu saja UG belum bisa menjadi faktor paling menentukan bagi kubu tertentu untuk meraih kursi presiden. Sangat bergantung dari dukungan UD. Dan UD kali ini berbeda penentuannya dengan UD jaman rezim Soeharto. UD kali ini ditentukan oleh hasil komposisi kemenangan parpol di daerah masing-masing. Ditiap propinsi akan diwakili 5 orang. Wakil propinsi itu ditentukan oleh hasil perdebatan dan komposisi kursi di DPRD.

Dalam pemilu 7 Juni 1999 Golkar kalah telak di beberapa propinsi Jawa. Tetapi menang di beberapa propinsi luar Jawa. Golkar menang di 14 propinsi luar Jawa. Sedangkan PDI-P menang di 13 propinsi Jawa dan luar Jawa. Daerah kemenangan Golkar itu sering disebut daerah Irama Suka (Irian Jaya, sebagian Sumatra, sebagian Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan).

Kalau dihitung kasar tentu di atas kertas Golkar masih unggul dalam meraih suara UD. Tetapi jika ditiap daerah kemenangan Golkar itu ternyata PDI-P atau PKB bisa bermain baik sehingga suara 5 dari propinsi tidak utuh diwakili "orang-orang Golkar"

maka kubu PDI-P akan unggul. Karena itu masih banyak faktor dan varian. Dan semua itu bisa menentukan siapa yang bakal menjadi presiden akan datang.

Karena UG dan UD tidak solid dan selalu bisa dipengaruhi setiap saat maka ketangguhan dan kecanggihan kubu-kubu capreslah yang akhirnya menentukan. Apalagi suara UG dan UD itu "cair". Artinya tidak bulat. Tidak ada yang memberi komando. Dan relatif bisa bebas. Kecuali memang orang partai itu sendiri.

Dari sini baik kubu Megawati maupun Habibie cenderung menghitung 50%-50%. Akibatnya suara bulat yang paling menentukan kelak justru suara TNI yang ada dalam DPR dan MPR (38 kursi DPR). Dari berbagai hitungan dari dua kubu itu maka yang paling menentukan adalah dukungan TNI. Jika dilihat dari posisi macam ini maka sangat kuat kalau TNI minta jatah Wakil Presiden. Skenario siapa pun (utamanya 2 kubu itu) selalu harus menghitung suara TNI.

Karena itu meskipun PKB telah memberikan dukungan terbuka kepada Megawati tidak berarti Wakil Presidennya kelak Matori Abdul Djilil (Jika Megawati yang menang). Sejak semula hitungan PDI-P selalu memasukkan PKB. PKB mendukung PDI-P bukan hal baru. Dilihat dari sini kekuatan bargaining meminta kursi Wakil Presiden antara PKB dan TNI masih kuat TNI. Apalagi jika dihitung dari masih kuatnya posisi hankam dan politik TNI.

Semua itu masih bisa berubah. Faktor kecil apa pun saat ini sangat berarti. Karena itu PT sebenarnya masih mempunyai kesempatan. Bahkan capres ke-3, mungkin dari Golkar atau dari PDI-P (selain Habibie dan Megawati) masih terbuka kemungkinan. Di sini menariknya SU MPR 1999. Kita saksikan kemungkinan kekuatan Poros Tengah di bawah ini.

Tabel 14: Komposisi Poros Tengah

No	Koalisi/Parpol	Kursi
1	PPP	59
2	PAN	35
3	PBB	13
4	PK	6
5	PNU	3
6	PKU	1
7	PP	1
8	PDR	1
9	PSII	1
	Jumlah	120

Sementara itu komposisi UG yang telah ditetapkan KPU mempunyai komposisi sebagai berikut.

Tabel 15: Komposisi Utusan Golongan 1999

No	GOLONGAN	ORGANISASI
1	GOLONGAN AGAMA	MUI, PP Wanita Syarikat Islam, NU, Muhammadiyah, Itihadul Mubaliqhin, DDII, KAHMI, Perhimpunan Al Irsyad Al Islamiyah, Pengurus Besar Al Jamiatul Wasliyah, BAMUIS, Hidayatullah, Mifdaul Anwar, DPP Al Ittidayah, BKMT, Persis, PGI, PGPI, KWI, Walubi, dan PHDI
2	GOLONGAN VETERAN, PERINTIS KEMERDEKAAN, DAN PEJUANG	LVRI, Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia, DHN 45, IKBLA-ARH
3	GOLONGAN PENYANDANG CACAT	DNPCI dan BPOC Pusat
4	GOLONGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	KORPRI, FSP-BUMN, Depdikbud, Depdagri, dan Wredatama
5	GOLONGAN ETNIS MINORITAS	Suku Dayak, Badui, Irian, Sangir, dan Kubu Anak Dalam
6	GOLONGAN PEREMPUAN	Perwari, Kowani,

		BMOIWI, PP Wanita Islam, dan Persatuan Wanita Kristen Indonesia
7	GOLONGAN EKONOMI DAN BADAN-BADAN KOLEKTIF	Dekopin, Inkud, Kopindo, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
8	GOLONGAN LSM	Walhi, YLKI, Ikatan Eksekutif Keuangan Indonesia, PKBI, dan Ikadin
9	PATI, ISEI, HPK, Parfi, BKSPTIS, APIK, ICMI, PIKI, dan Perguruan Taman Siswa	

Menghitung Aliansi Dari Hari Ke Hari

Satu tahun reformasi. Perubahan sosio-politik mulai tampak. Yang global, Golkar tidak bisa lagi menang mutlak. Golkar bukan *single majority* lagi. Perolehan suara dan kursinya sangat merosot, jika dibandingkan pemilu 1997, yaitu sekitar 120 kursi. Sedangkan PDI-P, yang dalam pemilu 1997 "golput" memperoleh suara dan kursi cukup besar sekitar 154. PPP dapat kursi kira-kira sebesar 59. PKB dapat kursi sekitar 51. Lalu disusul PBB sebesar 13 kursi. PKP, yang dimotori dan didanai sebagian militer itu cuma dapat 6 kursi. Sementara itu TNI memperoleh gratis sebanyak 38 kursi.

Dari sepintas perolehan suara itu tampak sekali tidak ada *single majority*. Ini artinya tidak ada lagi parpol yang bisa mendekte seperti jaman kuatnya Golkar. Begitu juga tak ada lagi dominasi militer di legislatif. Karena secara struktural dan personal

keberadaan TNI sangat terbatas, jika dibandingkan saat rezim Soeharto belum jatuh. Sehingga semua parpol dalam DPR dan MPR secara politis dan hukum mempunyai posisi sama.

Secara esensial tujuan reformasi adalah menjalankan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan yang demokratis. Ini semua artinya apa dalam konteks pencalonan presiden dan pembagian kekuasaan, tidak lain adalah semua yang ada di DPR dan MPR mempunyai kedudukan yang relatif sama. Jadi hak PK (Partai Keadilan) sama dengan Partai Golkar, PDI-P, dan PKB dalam pencalonan presiden. PP (Partai Persatuan), PDR, PKU, PNU, PNI FM, dan PNI MM (yang masing-masing dapat 1 kursi) mempunyai hak sama dengan PDI-P, Golkar, dan PKB. Mereka boleh mengajukan dan memperjuangkan capres masing-masing.

Dalam konteks semacam ini mestinya MPR harus menghindari pencalonan tunggal. Calon presiden akan datang harus banyak dan plural. Ini sebagai wujud dari hasil reformasi. Kalau nanti terjadi capres tunggal berarti reformasi telah "dirampok" oleh anggota legislatif dan MPR. Tidak ada bedanya dengan jaman rezim Soeharto. Karena itu setiap pencalonan presiden dan Kepala Daerah harus menunjukkan gejala demokrasi dan pluralisme.

Karena tidak ada *single majority* dan parpol begitu plural maka dalam menggalang aliansi atau bahkan pembagian kekuasaan akan datang diperlukan "kreativitas" tiap parpol. Pimpinan parpol dipaksa untuk menawarkan berbagai macam kemungkinan untuk membentuk pemerintahan akan datang. Pimpinan parpol tidak mungkin lagi bersifat *low profile*, dalam arti menunggu "dilamar".

Kondisi pemilihan presiden sangat berbeda dengan kondisi kampanye pemilu. Kampanye pemilu berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, luas, dan mayoritas relatif rendah tingkat pendidikannya. Lagi pula hubungan antara jurkam dan pimpinan parpol dengan massanya bersifat pasif dan satu arah komunikasinya.

Sedangkan kondisi pemilihan presiden di MPR sangat khusus. Para capres berhadapan dengan anggota MPR yang nota bene merupakan wakil pilihan rakyat. Jelas pendidikannya relatif baik. Bahkan mereka dalam kondisi pemilihan presiden ini penuh kepentingan dan bisa sangat kritis. Untuk itu maka parpol manapun harus pintar dan ahli merayu.

Kemampuan *bargaining* dalam kondisi sistem partai plural dan tanpa *single majority* ini sangat menentukan capres mana yang menang. Sampai sejauh secara samar-samar mulai tumbuh perkiraan, untuk sementara, pola aliansi. Yang pertama aliansi yang diperkirakan mendukung Megawati menjadi presiden. Perkiraan aliansi itu adalah PDI-P, PKB, PKP, PBI, PDKB, PNI FM, dan PNI MM. Kalau PAN teringat Deklarasi Ciganjur I maka PAN bisa mendukung PDI-P. Jika diperkirakan dengan dukungan Utusan Daerah dan Utusan Golongan, berdasarkan perolehan suara di tingkat distrik, kabupaten, dan kotamadya maka aliansi pendukung Megawati sebesar 349 kursi.

Sedangkan aliansi yang mendukung B.J Habibie diperkirakan: Golkar, PPP, PBB, PK, PNU, PDI BH, IPKI, PP, PDR, PSII, dan PKU. Kalau ditambah dengan Utusan Golongan dan Utusan Daerah maka aliansi yang mendukung B.J Habibie diperkirakan sebesar 313 kursi. Di sini kursi dan suara TNI akan sangat menentukan. Jika 38 suara itu diberikan kepada Golkar maka B.J Habibie kembali menjadi presiden. Tetapi kalau suara itu diberikan kepada Megawati maka putri Soekarno ini akan menjadi presiden.

Dalam konteks seperti ini jelas posisi TNI sangat menentukan. Dalam berbagai isu yang muncul ke permukaan, tampaknya bagi TNI pilihan dijabatkan ke Habibie dan Megawati relatif sama. Artinya, sebenarnya kultur dan konsep kepartaian antara Golkar dan PDI-P relatif sama. Apalagi konon tawaran kepada TNI dari kedua kubu itu relatif sama: Wakil Presiden buat Wiranto.

Sebenarnya di samping suara dan kursi TNI yang cukup menentukan sosok presiden Indonesia, kekuatan parpol Islam juga sangat besar artinya bagi siapa yang bakal menjadi presiden. Dalam pekan ini muncul Poros Tengah, kekuatan politik Islam plus PAN mulai bertekad membentuk aliansi sendiri dan berusaha menjadi penentu sendiri. Jadi mereka bukan lagi sebagai pelengkap dari skenario PDI-P atau Partai Golkar.

Mereka yang ada di Poros Tengah ingin memainkan kekuatannya sendiri. Kalau Poros Tengah ini semakin kuat dan mendapat simpati anggota MPR lainnya maka sangat mungkin Partai Golkar dan PDI-P merosot nilai bargainingnya. Apalagi kalau mayoritas PKB bergabung ke Poros Tengah, bisa dipastikan presidennya dari Poros Tengah.

Tetapi Poros Tengah ini masih belum solid. Mereka masih menunggu reaksi kekuatan lainnya. Karena itu masih sangat banyak faktor yang muncul dan mempengaruhi jalannya SU MPR akan datang. Ini berarti masih sangat banyak variabel dan faktpr yang berkembang yang bisa mendorong seseorang menjadi presiden akan datang. Kita bisa lihat tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16 : Kemungkinan Pola Aliansi dalam SU MPR 1999

NO	Pola Aliansi	Kursi	Keterangan
1	Aliansi Mendukung Megawati	349	PDI-P, PKB, PAN, PKP, PBI, PDKB, PNI FM, PNI MM, Utusn Daerah dan Golongan. Kalau PAN tidak mendukung maka suaranya tinggal 314
2	Aliansi Mendukung Habibie	313	Partai Golkar, PPP, PBB, PKU, PSII, PNU, PK, PP, IPKI, PDR, PDI-BH, U-Daerah dan

			Golongan.
3	Aliansi Islam Reformis	214	PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PNU, PKU, PP, PDR, PSII, U-Daerah, dan U-Golongan. Tetapi banyak kalangan yang meragukan terjadi aliansi macam ini. Mengingat parpol Islam sangat heterogen dan kepentingannya dalam SU MPR akan datang berbeda-beda.
4	Aliansi Partai Islam, PAN, dan PKB	170	PPP, PKB, PAN, PBB, PK, PNU, PKU, PP, PSII. Poros Tengah yang saat ini sedang diformatkan adalah kumpulan dari parpol Islam plus PAN. Tetapi sampai sejauh ini masih minus PKB (51 kursi).
5	Aliansi Nasionalis + non Islam	168	PDI-P, PKP, PBI, PDKB, PNI FM, PNI MM

Data diolah dari Oposisi, No 51 tahun 1, 21-27 Juli 1999

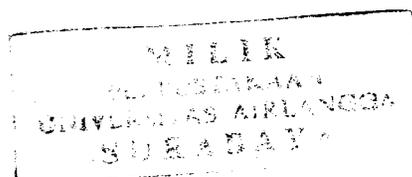
Tabel 17: 3 Kubu yang Memperebutkan Kursi Presiden

No.	KUBU MEGAWATI	POROS TENGAH	KUBU PARTAI GOLKAR
1	PDI-P 153	PAN 34	Partai Golkar 120
2	PKB 51	PPP 58	PDR 11
3	PKP 4	PBB 13	PDI-BH 2
4	PBI 1	PK	IPKI (?) 1
5	PDKB 5	PNU 5	PKD 1
6	PNI 1	MM 1	PKU 1
7	PNI 1 (?)	FM 1	PP 1
8	Utusan Daerah 97 (+)	UG 1	PSII 1
		PP 1	Masyumi
	Jumlah 313 (+)	Jumlah 121 (+)	Jumlah 225 (+)

Komposisi dalam kondisi statis
Kursi TNI 38

Dari berbagai hitungan di atas tampak sekali aliansi temporer antara Poros Tengah dan Golkar mampu mengalahkan aliansi antara PDI-P dan PKB. Lebih-lebih dalam Sidang Umum MPR 1999 ternyata Poros Tengah mampu bermain cantik, yaitu mengajukan Abdurachman Wahid (Gus Dur) sebagai calon presiden. Strategi ini jelas memecah koalisi antara PKB dan PDI-P. Akibatnya dalam voting pemilihan presiden terbukti Gus Dur menang cukup besar atas calon presiden PDI-P, Megawati.

Poros Tengah mutlak mengajukan Gus sebagai capres setelah Habibie ditolak pertanggungjawabannya dalam SU MPR 1999. Setelah ditolak MPR Habibie tidak mengajukan diri sebagai calon presiden. Apalagi dalam tubuh Golkar sendiri terpecah



tatkala Habibie dicalonkan sebagai presiden. Mundurnya Habibie semakin memperkuat calon Poros Tengah dalam mengajukan capres Gus Dur.

Gagalnya Megawati menjadi presiden menimbulkan dampak kerusuhan sosial, utamanya dari pendukung Megawati. Di Jakarta dan daerah-daerah lainnya terjadi kerusuhan dan amuk massa PDI-P. Mereka kecewa berat atas gagalnya Megawati menjadi presiden.

Menyaksikan perkembangan buruk itu maka konon Gus Dur, Poros Tengah, dan Golkar membujuk Megawati bersedia menjadi Wakil Presiden. Dalam SU MPR lanjutan, tatkala pemilihan Wakil Presiden, semua calon Poros Tengah mundur kecuali Hamzah Haz. Sehingga calon Wakil Presiden adalah Megawati dan Hamzah Haz. Setelah voting Megawati akhirnya menang menjadi Wakil Presiden. Jelas kemenangan Megawati tersebut atas dukungan dan "rekayasa" sebagian besar tokoh Poros Tengah dan Golkar.

BAB VI

KESIMPULAN

Partai politik peserta pemilu 1999 merupakan refleksi dari reaksi masyarakat atas ambuknya sistem politik otoriter rezim Soeharto. Karena itu di balik ratusan parpol baru dan 48 parpol peserta pemilu merupakan gejala bangkitnya kekuatan rakyat yang berpuluh tahun diformat dan dikemas secara kaku dan terbatas dalam sistem politik Orde Baru.

Parpol peserta pemilu pada dasarnya merupakan refleksi dari heterogenitas masyarakat Indonesia. Secara sederhana 48 parpol peserta pemilu bisa dipilah ke dalam dimensi agama, nasionalisme, klas sosial, pola aliran. Komposisi 48 parpol peserta pemilu 1999 sangat bervariasi. Tidak bisa hanya difahami dalam pola aliran, tidak juga hanya dalam pola klas sosial, dan tidak hanya pola konflik negara dan masyarakat. Pola 48 parpol peserta pemilu merupakan generasi ke-4 parpol Indonesia yang sedang mengalami perubahan.

Perolehan suara dalam pemilu 1999 ternyata sebagian besar masih menunjukkan ke arah konservatisme masyarakat dalam berpolitik. Kecenderungan politik atas dasar *political identification* masih sangat kuat dalam proses pemilu dan perpolitikan di Indonesia. Pola ini melahirkan kecenderungan pola aliran.

Perolehan suara yang besar dari PDI-P, PKB, PPP, dan Golkar merupakan kuatnya gejala konservatisme dalam perpolitikan Indonesia. Sementara PAN pun banyak didukung oleh suara Islam, utamanya sebagian suara Muhammadiyah. Para orang kota yang kritis tidak terlalu banyak menentukan suara dalam pemilu 1999. Mereka cenderung

hanyut dalam pola aliran besar. Karena itu kekerasan politik pemilu dan kerusuhan politik setelah pemilu merupakan bagian penting dari perpolitikan konservatisme dalam kondisi transisi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict & Kahin, Audrey (ed.): *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*, Cornell University, New York, 1982.
- Alatas, Syed Farid: *Theoretical Perspectives on the Role of State Elites in Southeast Asian Development*, dalam *Contemporary Southeast Asia*, Volume 14, No.4, March 1993
- Amal, Ichlasul (ed.): *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988
- Budiman, Arief (ed.): *State and Civil Society in Indonesia, Centre of Southeast Asian Studies*, Monash University, 1990
- : *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, Yayasan Padi dan Kapas, Jakarta, 1991
- Dhakidae, Daniel dan Witdarmono (Penanggung Jawab): *Partai Partai Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program*, KOMPAS, P.T Gramedia, Jakarta, 1999
- Duverger, Maurice: *Political Parties*, (New York: John Wiley and Sons Inc., 1955)
- Jackson, Karl D & Pye, Lucian W. (ed.): *Politics Power and Communications in Indonesia*, University of California Press, Berkeley, 1978
- Lapalombara, Joseph dan Weiner, Myron, (eds.), *Political Parties and Political Development*, (Princeton University Press, 1966)
- Mas'oeed, Mohtar: *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1965-1971*, LP3ES, Jakarta, 1989